



2025

RENCANA KERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2026

RENJA DP3AP2KB



TAHUN 2026

**KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

10. Desa ...

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Bogor adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20 Anggaran ...

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
25. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
27. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

29. Kegiatan ...

29. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
30. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2026 merupakan pedoman rencana Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang urusan/unsur, tanggung jawab dan fungsi.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
- (5) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dalam SIPD.
- (6) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS, RKA SKPD dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
- (7) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. pendanaan dan sumber pendanaan; dan
- d. dukungan terhadap prioritas nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pasal 4

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2026

Pasal 5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja PD Tahun 2026 memedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2026, serta Renstra PD Tahun 2025-2029 untuk tahun 2026.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
 - b. terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/ kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah;
 - c. terjadi ...

- c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja; dan
 - d. terjadi perubahan Renstra PD;
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 7

Perubahan Renja PD disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2026;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan Renja PD Tahun 2026; dan
- c. penetapan perubahan Renja PD Tahun 2026.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi perubahan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (6) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2026 dan Perubahan Renja PD Tahun 2026 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 Agustus 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rancangan Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2026 ini merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi bahan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Rancangan Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman yang baik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

Cibinong, September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana



Ir. Sussy Rahayu Agustini, M.T
NIP. 196808201995032002

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 24 TAHUN 2025

TANGGAL : 7 AGUSTUS TAHUN 2025

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 disusun secara simultan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Di samping itu, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 menjadi bagian dari tahapan “fondasi” periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029. Yang telah dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 telah memedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tujuan dan sasaran daerah, yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan Tahapan:

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan
6. Penetapan Renja

Khususnya dalam tahap kelima, perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disinkronisasikan dengan substansi yang dirumuskan dalam rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. Adapun mengenai perencanaan kegiatan dan anggaran dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masuk dalam prioritas nasional ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Prioritas daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ialah *Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*. Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor yaitu **Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang**, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan yaitu *Indeks Ketimpangan Gender (IKG)*, *Indeks Perlindungan Anak (IPA)*, dan *Angka kelahiran total (TFR)* dengan sasaran 1) Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi, 2) Kategori Kabupaten Layak Anak, dan 3) Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagai dasar dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sehingga diterbitkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan bidang Keluarga Berencana dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;

- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada penjabaran 8 Misi Asta Cita yang ke-4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Disamping itu juga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat mendukung Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja DP3AP2KB Kabupaten Bogor didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)
 15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 20. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
34. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional;
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
39. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

40. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ; Tahun 2021 Nomor 910) ; Tahun 2021 Nomor 910) ;

49. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 361);
50. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
51. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
59. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor).
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 12);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 adalah :

1. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam merumuskan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2026.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2026.
3. Menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rancangan Renja DP3AP2KB Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DP3AP2KB TAHUN 2024

- 2.1 Capaian Kinerja DP3AP2KB
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan DP3AP2KB
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja DP3AP2KB
- 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DP3AP2KB

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP3AP2KB
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DP3AP2KB

- a. Renstra DP3AP2KB tahun 2025-2029
- b. RKPD Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) TAHUN 2024

2.1. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor Tahun 2026 memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dari tahun 2024 dan Rencana Program/Kegiatan tahun 2024. Dalam menyusun rencana program/kegiatan tahun 2026 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2024, pencapaian target Perubahan Rencana Strategis DP3AP2KB tahun 2024-2026, serta realisasi DPA DP3AP2KB Tahun 2024.

Renja Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan RKA 2026, namun seiring dengan adanya dinamika, isu-isu strategis, aspirasi dari pemangku kepentingan serta alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah maka kegiatan dalam DPA tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mengalami beberapa perubahan baik dalam jumlah kegiatan serta pagu anggaran pada masing-masing kegiatan yang tergantung pada besaran anggaran yang tersedia.

Renstra DP3AP2KB tahun 2025-2029 menjabarkan RPJMD 2025-2029 dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yang pencapaiannya akan dievaluasi sampai dengan akhir tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun kedua periode perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029, dengan mengusung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”. Dengan demikian, penyusunan Renja PD tahun 2026 telah menjadi bagian penting dalam substansi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun pada saat penyusunan Renja PD tahun 2026, dokumen RPJMD masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Renja PD secara substansi telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan sebagaimana RPJMD Tahun 2025-2029.

Perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan ditampilkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2024 dan Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Tahun 2024.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) S/D TAHUN 2024

URUSAN / UNSUR : NON URUSAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
TAHUN 2020															
		12	02	21		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga Perempuan yang Memperoleh Keterampilan	%	0,87						
							Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender	%	34,72						
							Rasio KDRT	%	0,0044						
					0001	Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Orang	35						
					0002	Penyelenggaraan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Keluarga yang Dibina Dilokasi P2WKSS	Orang	100						
					0003	Pelatihan pelaksanaan PUG dan PPRG	Jumlah Peserta Pelatihan Advokasi dan Fasilitasi PUG, Peserta Pelatihan PUG dan PPRG dan Peserta Peringatan Hari Ibu	Orang	100						
					0006	Pengelolaan Data dan Informasi Gender	Tersusunnya Data dan Informasi Gender	Dokumen	1						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					0008	Pencegahan dan Pengelolaan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Peserta Pelatihan Pendamping Perempuan Korban Kekerasan dan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan (TPPO)	Orang	60						
		12	02	22		PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terbentuknya Forum Anak Tingkat Kecamatan	%	11,54						
							Perentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Anak Terpilah	%	33,33						
					0001	Pembentukan dan Pembinaan Kecamatan Ramah Anak	Terbentuknya Kecamatan Layak Anak dan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Orang	7						
					0003	Jumbara Anak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Jumpa dan Lomba Kreativitas Anak dan Remaja se-Kabupaten Bogor	Orang							
					0004	Pengelolaan Data dan Informasi Anak	Jumlah Dokumen Profil Anak dengan Data Terpilah	Buku	65						
					0006	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Tertangani dan Tertanggulangi	Kecamatan	40						
					0007	Penguatan Komitmen Perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kader yang Terlatih dan Aktif dalam Pengelolaan Perlindungan Anak	Orang	120						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		12	02	23		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak	%	100,00						
					0001	Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA I Ciawi	Jumlah kegiatan urusan PPPA yang dilaksanakan di UPT	Kegiatan	11						
					0002	Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA II Jonggol	Jumlah kegiatan urusan PPPA yang dilaksanakan di UPT	Kegiatan	8						
					0003	Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA III Ciseeng	Jumlah kegiatan urusan PPPA yang dilaksanakan di UPT	Kegiatan	7						
					0004	Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA IV Tamansari	Jumlah kegiatan urusan PPPA yang dilaksanakan di UPT	Kegiatan	11						
					0005	Pengelolaan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak UPT PPA V Leuwisadeng	Jumlah kegiatan urusan PPPA yang dilaksanakan di UPT	Kegiatan	7						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		12	02	24		PROGRAM PENYULUHAN DAN ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	84,51						
							Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	%	100,00						
					0001	Pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Kampung KB	Jumlah Terbentuknya Kampung KB	Kelompok	3						
					0002	Penguatan Komitmen dalam Pengendalian Penduduk	Terbentuknya Kesepakatan dalam Rakor Kesrak PKK-KKBPK- Kesehatan, Rakor Bakti TNI KB Terpadu dan Rakor Kampung KB	Orang	200						
					0003	Penyuluhan Pengendalian Penduduk melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah Peserta Pertemuan dan Penyuluhan KB Masyarakat tentang Program KKBPK	Orang	1.000						
					0005	Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)	Jumlah Kepala Keluarga yang Didata 40 Kecamatan	Kecamatan	9						
					0008	Perencanaan Pengendalian Penduduk Melalui Pola Kemitraan	Terjalinnnya Kerjasama Antar Lintas Sektor	Dokumen	2						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					1000	Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	Jumlah Sarana Unit Mobil Penetangan (MUPEN)		1						
					1001	Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Personal Computer (DAK)	Jumlah Sarana Personal Computer		3						
					1002	Pengadaan Media/Alat Pengolah Data Note Book/Laptop (DAK)	Jumlah Laptop/Note Book		1						
					1003	Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	Jumlah Sarana PPKBD dan Sub PPKBD		7						
					1004	Biaya Oprrasional Integrasi Program KKBPK (DAK)	Terselenggaranya Pertemuan POKJA, FORUM dan LOKMIN Desa/Kec dan Terbinanya Kampung KB		28						
					1005	Operasional Pembinaan Program KKBPK Bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD DAN SUB PPKBD) (DAK)	Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan Prilaku Masyarakat di Desa/Kelurahan tentang Program KKBPK		3.480						
					1006	Dukungan Pembuatan Media KIE (DAK)	Jumlah Informasi/Media KIE Program Bangga Kencana/KKBPK yang Tersebar di Kecamatan		40						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		12	02	25		PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur	%	11,13						
							Cakupan Pus Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber- KB	%	83,60						
							Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Ber- KB	%	79,00						
							Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	%	84,16						
							Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%	87,31						
							Persentase Kelompok PIK Remaja yang terbentuk	%	75,00						
					0001	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Bertambahnya Jumlah Pasangan Usia Subur yang mempergunakan Alat Kontrasepsi IUD	Akseptor	3.300						
					0003	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga, Peserta yang Mengikuti Peringatan Hari Keluarga Nasional, Pelatihan Ketahanan Keluarga dan Pelatihan Pola Pengasuhan 1000 HPK	Orang	334						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					0004	Pembentukan dan Pembinaan kelompok UPPKS melalui Usaha Ekonomis Produktif (UEP)	Jumlah Keluarga yang Dilatih dalam Usaha Ekonomi Produktif dan Pembentukan Kelompok UPPKS	Orang	150						
					0005	Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Remaja tentang PUP, Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Remaja tentang TRIAD KRR, Meningkatnya Remaja dan Mahasiswa dalam Memahami Program Genre dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan PSKS	Orang	320						
					1000	Pengadaan Sarana BKB KIT (DAK)	Jumlah Sarana KIE yang Tersedia bagi Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)		18						
					1001	Pengadaan Sarana BKL KIT (DAK)	Jumlah Sarana KIE yang Tersedia bagi Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)		22						
					1002	Pengadaan Sarana Genre KIT (DAK)	Jumlah Sarana KIE yang Tersedia bagi Kelompok PIK R		6						
					1001	Operasional Kelompok Tribina Berbasis Ketahanan Keluarga (DAK)	Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Terbina dalam Program Bangga Kencana di Kampung KB		600						
					1000	Pola Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting (DAK)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembinaan Pola Asuh 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting		230						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		12	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Keseekretariatan	%	100,00						
							Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai	%	100,00						
							Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	100,00						
							Persentase Perencanaan sesuai Target	%	100,00						
							Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%	100,00						
					0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet yang Dibayarkan	Bulan	12						
					0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Majalah	Exp							
					0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	Jenis	88						
					0004	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman dalam 1 Tahun	Bulan	12						
					0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor yang Diberi Honor dalam Setahun 8 Orang	Bulan	12						
					0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan yang Dibiayai dalam Satu Tahun 5 Orang dalam Satu Tahun	Bulan	12						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang Diperbaharui	Unit	292						
					0203	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia	Unit	7						
					0206	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis	11						
					0351	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah/Luas Gedung Kantor yang Dipelihara 2.826 m2 (1 Gedung)	Unit	2						
					0354	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	Unit	14						
					0355	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara	Unit	78						
					0357	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	9						
					0450	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang Dilakukan	Bulan	6						
					1001	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur yang Terlaksana	Bulan	12						
					1003	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	Bulan	12						
					1004	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Aparatur yang Diikutsertakan dalam Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Orang	2						
					2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen	3						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					2002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan (Laporan Fungsional)	Dokumen	12						
					2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Lakip Tahun 2019	Dokumen	1						
					2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran SKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021	Dokumen	5						
					2005	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RENCANA KERJA SKPD Tahun 2021 dan Tersusunnya Dokumen RENCANA KERJA Perubahan SKPD Tahun 2020	Dokumen	5						
					2007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan, Tahunan SKPD Tahun 2020	Dokumen	6						
					0007	Publikasi Kinerja SKPD	Publikasi Kinerja SKPD Tahun 2020 Melalui Media Cetak dan Media Elektronik	Media Masa	6						
					3005	Biaya Operasional Balai Penyuluhan (DAK)	Jumlah Balai Penyuluhan yang Terfasilitasi		10						
					3006	Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK)	Jumlah Faskes yang Mendapat Distribusi Alokasi		128						
					3007	Dukungan Manajemen BOKB (DAK)	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program KKBPK Melalui Sosialisasi dan Pembinaan		4						

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
TAHUN 2021															
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsive gender (ARG) pada Belanja Daerah	%		30,27					
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SKPD Kabupaten Bogor	%		100,00					
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan SKPD	SKPD		60					
							Terlaksananya Workshop Auditor Responsif Gender	Auditor		72					
					04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Terlaksananya Bimtek PPRG bagi Perangkat Daerah	SKPD		32					
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan pada Organisasi Perempuan	Kecamatan		3					
							Terlaksananya Raker APE	Lembaga		3					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio		0,0025					
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rakor Perempuan	Orang		60					
					02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	Orang		80					
							Terlaksananya Pelatihan Relawan PPA	Kasus		20					
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Pekka Jumlah Sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi Sekoper Cinta Jumlah Sosialisasi Trafficking	Orang		100					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi KDRT	Orang		30					
							Jumlah Peserta Sosialisasi KDRT	Orang		0					
							Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Kasus		0					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Pekka Jumlah Sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi Sekoper Cinta Jumlah Sosialisasi Trafficking	Orang		100					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi trafficking	Orang		100					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang Terlayani	Orang		5					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan	%		3,61					
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan P2WKSS	KK		100					
							Terlaksananya Pembinaan Kelompok PEKKA, Kelompok Perempuan	Kelompok		0					
							Terlaksananya Sosialisasi Sekoper Cinta	Orang		0					
2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang Terbina	%		100,00					
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsolidasi Organisasi/ Rapat Ranting Dpc Iwapi Kabupaten Bogor 6 Wilayah	Wilayah		6					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Terlaksananya Pelatihan Kemasan/ Packaging 100 Orang	Orang		100					
							Terlaksananya Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Dpc Iwapi Kabupaten Bogor 100 Orang	Orang		100					
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%		58,33					
2	08	05	2			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Anak yang Tersusun	Buku		30					
					02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD dan Instansi yang Mengikuti Kegiatan Diseminasi dan Pengolahan Data Gender	Orang		125					
							Jumlah Dokumen Data Gender yang Tersusun	Buku							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemenuhan Hak Anak	%		30,00					
2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Layak Anak	Kecamatan		4					
							2 Terlaksananya Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Kecamatan		5					
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD, Lembaga Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Orang		80					
							Jumlah Peserta Rakor Forum Anak	Orang		100					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diberi penguatan di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang Mengikuti Hari Anak Nasional (HAN)	Orang		150					
							Jumlah Media KIE yang Tersedia	Paket		40					
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan KLA	Orang		45					
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA I Ciawi)	Jumlah Peserta Sosialisasi Kecamatan Layak Anak								

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA II Jonggol)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA III Ciseeng)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA IV Tamansari)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA V Leuwisadeng)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak (KELANA)								

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani dan Didampingi	%		0,00004 7					
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Lintas Sektor	%		100,00					
					01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Workshop Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 2. Terlaksananya Seminar Hari Anak 3. Terlaksananya Monitoring (Jumlah SKPD, Forum Anak, Lembaga Pemerhati Anak, dan Satgas PPA, UPT PPA yang Mengikuti Workshop Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Seminar Hari Anak)	Orang		90					
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD, Lembaga Pemerhati Anak, UPT PPA, Gugus Satgas PPA yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan	Orang		40					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan di Kabupaten Bogor	%		100,00					
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Orang		40					
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Media KIE yang Tersedia	Jenis		2					
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Gugus PPA, Guru Paud dan TK, KPAD yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak	Orang		50					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah Pendampingan dan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Kasus		5					
							b. Jumlah Peserta Pembinaan Satgas	Orang		8					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah Pendampingan dan Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak	Kasus		10					
							b. Jumlah Peserta Pembinaan Satgas	Orang		80					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Pendampingan dan elayanan kasus kekerasan terhadap anak	Kasus		4					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	Kasus		10					
							b. Jumlah peserta pembinaan Satgas	Orang		80					
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus keekrasan terhadap anak	Orang		125					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
						Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%		25,00					
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan kabupaten bogor yang bersinergi dengan provinsi	%		100,00					
					01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	'Jumlah Pentahelik yang terlibat (OPD, Perusahaan, Media, PT, Organisasi masyarakat)								
					02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan								
					05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kejasama yang Disepakati								

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK								
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang		40					
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang		80					
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang		80					
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang		85					
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang		125					
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang Tersedia di daerah	%		100,00					
						Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dibentuk Tingkat Kecamatan								
					09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Sistem Informasi Keluarga yang dibina	Kecamatan		16					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Kecamatan		40					
					13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah dan dilaporkan	Buku		540					
					14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK yang terbina	Orang		200					
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UNMET NEED)	%		13,62					
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%		100,00					
					01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja yang terlaksana	Orang		50					
					02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Bogor yang terlaksana	Orang		95					
					03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Manajemen Bangsa Kencana	Kecamatan		40					
							Terlaksananya Penyampaian Informasi Melalui Media	Media		3					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluh	Kegiatan		1					
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%		100,00					
					01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	(Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang terlaksana)	Orang		45					
					03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang diperkuat dan dilaksanakan	Orang		30					
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Orang		14.355					
							Tersedianya data Dasar Program Bangga Kencana di Tingkat Desa/ Kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang		6.525					
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan I Ciawi	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		70					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan II Jonggol	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		80					
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan III Ciseeng	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		95					
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan IV Tamansari	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		85					
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan V Leuwisadeng	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		70					
2	14	03	2			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten Bogor	%		100,00					
					03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang meningkat	Akseptor		9.020					
					04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
					05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah tersusunnya Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Bulan		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	Jenis		7					
					11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lokasi		5					
					12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang		40					
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		15					
							Saresehan hasil pelayanan KB	Orang							
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		25					
							Jumlah peserta KIE kesehatan reproduksi bagi ibu kelompok BKB	Orang		40					
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		20					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		20					
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang		10					
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang		15					
							Jumlah pendampingan calon peserta KB Pria	Orang							
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang		52					
							Jumlah peserta pembentukan kelompok KB Pria	Orang		60					
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang		7					
							Jumlah Peserta KIE MOP	Orang							
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang		15					
							Jumlah peserta pembinaan paguyuban KB pria	Orang							

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang		20					
					01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya kegiatan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	Kegiatan		1					
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan ditingkatkan di Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		100,00					
					02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Orang		90					
					03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Orang		30					
							Terlaksananya pengelolaan program bangsa kencana	Kecamatan		40					
					04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Orang		80					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber- KB	%		83,52					
							Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	%		90,00					
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%		100,00					
					01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok UPPKS	Kelompok		15					
							Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL)	Kelompok		30					
					02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok BKB Kit , BKR Kit, dan BKL Kit yang tersedia	Lembar		5.000					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) yang mengikuti Pelatihan	orang		65					
					04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS) yang mengikuti Pelatihan Teknis	Orang		130					
					06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya operasional kegiatan edukasi pengasuhan 1000 HPK	orang		420					
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Kelompok		110					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Orang		35					
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga	Orang		33					
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga	Orang		30					
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga	Orang		40					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga	Orang		90					
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	%		100,00					
					02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya yang diberdayakan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan yang diberdayakan	Kelompok		30					
							Terlaksananya pemilihan Duta Genre Kabupaten Bogor Tahun 2021	Orang		80					
					04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Kelompok PIK Remaja	Orang		120					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya yang diberdayakan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan yang diberdayakan								
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100,00					
2	08	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Dokumen		17					
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah	Dokumen		1					
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen		2					
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1					
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1					
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja PD	Dokumen		1					
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1					
							Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja PD	Dokumen		1					
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah SKPD	Dokumen		3					
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan PD	Laporan		4					
							Jumlah Tayangan Publikasi Kinerja PD	Media		4					
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat daerah	%		100,00					
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPM/SPP Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen		36					
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		2					
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Register SPP/SPM Belanja	Dokumen		2					
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen		1					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan	Dokumen		1					
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	Laporan		12					
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1					
2	08	01	2	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	%		100,00					
					01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai yang dikelola oleh perangkat daerah	Bulan		12					
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas								
2	08	01	2	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	%		100,00					
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis		24					
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit		1					
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jumlah bahan logistik kantor	Jenis		1					
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis		8					
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan								

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makanan dan minuman	Orang		1.500					
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilakukan	Provinsi dan Kecamatan		46					
2	08	01	2	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	%		100,00					
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit		1					
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis		5					
					11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit		2					
2	08	01	2	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		100,00					
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik,Air dan Internet	Bulan		12					
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor dan Petugas Jasa Kebersihan	Bulan		12					

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	01	2	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		100,00					
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan	Unit		300					
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Gedung		1					
					10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit		121					
TAHUN 2022															
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsive gender (ARG) pada Belanja Daerah	%			33,55				
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SKPD Kabupaten Bogor	%			100,00				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan SKPD	SKPD			60				
							Terlaksananya Workshop Auditor Responsif Gender	Auditor			72				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Terlaksananya Bimtek PPRG bagi Perangkat Daerah	SKPD			32				
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pada organisasi Perempuan	Kec			3				
							Terlaksananya Raker APE	Lembaga			3				
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	rasio			0,01				
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Pendampingan Kasus kekerasan terhadap perempuan	Orang			60				
							Terlaksananya Pelatihan Relawan PPA	kasus			20				
					02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rakor Perempuan	Orang			20				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%			100				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Pekka Jumlah sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi Sekoper Cinta Jumlah Sosialisasi trafficking	orang			100				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi KDRT	Orang			30				
							Jumlah peserta sosialisasi KDRT	Orang			50				
							Jumlah Pengaduan yang terlayani	Kasus			10				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Pekka Jumlah sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi Sekoper Cinta Jumlah Sosialisasi trafficking	orang			100				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi Kelompok PKDRT Jumlah Sosialisasi trafficking	orang			100				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang terlayani	Orang			5				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				58				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				58				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				58				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				58				
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				58				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan	%			3,24				
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan P2WKSS	KK			100				
							Terlaksananya Pembinaan Kelompok PEKKA, kelompok Perempuan	Kelompok			5				
							Terlaksananya Sosialisasi Sekoper Cinta	Orang			30				
2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%			100,00				
					02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsolidasi Organisasi/ Rapat Ranting Dpc Iwapi Kabupaten Bogor 6 Wilayah	Wilayah			6				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							Terlaksananya Pelatihan Kemasan/ Packaging 100 orang	Orang			100				
							Terlaksananya Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Dpc Iwapi Kabupaten Bogor 100 orang	Orang			100				
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	%			83,95				
2	08	05	2			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Anak yang tersusun	Buku			70				
							Pengumpulan dan pengolahan Data terpilah Gender dan Anak				1				
					02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD dan instansi yang mengikuti kegiatan Diseminasi dan pengolahan Data Gender	Orang			125				
							Jumlah Dokumen Data Gender yang tersusun	buku			80				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak	%			60,00				
2	08	06	2			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Layak Anak	Orang			4				
							2 Terlaksananya Pembentukan Kecamatan Layak Anak	kecamatan			5				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD , Lembaga Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang mengikuti kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Orang			80				
							Jumlah peserta Rakor Forum Anak	Orang			100				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diberi penguatan di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum anak yang mengikuti Hari Anak Nasional (HAN)	Orang			150				
							Jumlah Media KIE yang tersedia	Paket			40				
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan KLA	Orang			45				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA I Ciawi)	Jumlah Peserta Sosialisasi Kecamatan Layak Anak	Orang			21				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA II Jonggol)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Orang			28				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA III Ciseeng)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Orang			31				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinga Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA IV Tamansari)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak	Orang			32				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA V Leuwisadeng)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan LAYak Anak (KELANA)	Orang			28				
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi	%			0,0100				
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan lintas sektor	%			100,00				
					01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD, Forum Anak, Lembaga pemerhati anak, dan Satgas PPA, UPT PPA yang mengikuti workshop Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan seminar Hari anak	orang			95				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Evaluasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 55 Orang	orang			40				
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan di Kabupaten Bogor	%			100,00				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				
					03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media KIE yang tersedia	Jenis			2				
					04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus PPA, Guru Paud dan TK, KPAD yang mengikuti kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak	Orang			50				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	kasus			5				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
							b. Jumlah peserta pembinaan Satgas	Orang			8				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	Kasus			10				
							b. Jumlah peserta pembinaan Satgas	Orang			80				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	Kasus			4				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap anak	Kasus			10				
							b. Jumlah peserta pembinaan Satgas	Orang			80				
					01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah pendampingan dan pelayanan kasus keekrasan terhadap anak	Orang			125				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				
					02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan kasus kekerasan terhadap anak	Orang			40				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan di Kabupaten Bogor	%			100,00				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus	Orang			29				
						Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
						Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%			75				
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan kabupaten bogor yang bersinergi dengan provinsi	%			100				
					01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Pentahelik yang terlibat (OPD, Perusahaan, Media, PT, Organisasi masyarakat)	Orang			50				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan	Orang							
					05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kejasama yang Disepakati	Orang			30				
					15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rapat Pengendalian Program KKBPK	Orang			50				
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang			40				
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang			80				
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang			80				
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang			85				
					14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah Hasil Pemutakhiran data keluarga yang diinformasikan	Orang			125				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang Tersedia di daerah	%			100,00				
						Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang dibentuk Tingkat Kecamatan	Orang			50				
					09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Sistem Informasi Keluarga yang dibina	Kecamatan			16				
					11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Kecamatan			40				
					13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah dan dilaporkan	Buku			540				
					14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK yang terbina	Orang			200				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (UNMET NEED)	%			24,58				
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%			100,00				
					01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja yang terlaksana	Orang			50				
					02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Bogor yang terlaksana	Orang			95				
					03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Manajemen Bangga Kencana	Kecamatan			0				
							Terlaksananya Penyampaian Informasi Melalui Media	Media			0				
					07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluh	Kegiatan			0				
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tersedianya Media Promosi penyuluhan KIE				2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Terlaksananya Pertemuan Minilokakarya				9.600				
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK CIAWI	Terlaksananya kegiatan program KKBPK				4				
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK JONGGOL	Terlaksananya kegiatan program KKBPK				4				
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK CISEENG	Terlaksananya kegiatan program KKBPK				4				
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK TAMANSARI	Terlaksananya kegiatan program KKBPK				4				
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK LW SADENG	Terlaksananya kegiatan program KKBPK				4				
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				356				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%			100				
					01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	(Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang terlaksana)	Orang			45				
					03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) yang diperkuat dan dilaksanakan	Orang			30				
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	Orang			14.355				
							Tersedianya data Dasar Program Bangga Kencana di Tingkat Desa/Kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang							
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan I Ciawi	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			70				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan II Jonggol	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			80				
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan III Ciseeng	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			95				
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan IV Tamansari	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			85				
					04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT Wilayan V Leuwisadeng	Jumlah terlaksananya penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang			70				
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten Bogor	%			100				
					03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang meningkat	Akseptor			9.020				
					04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kasus			2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah tersusunnya Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Bulan			12				
					06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia	Jenis			7				
					11	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes Yang terlayani	Faskes			66				
					11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Lokasi			5				
					12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang			40				
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang			15				
							Saresehan hasil pelayanan KB				15				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang			25				
							Jumlah peserta KIE kesehatan reproduksi bagi ibu kelompok BKB				40				
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang			20				
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang			20				
					09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah terlaksananya Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang			10				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah I Ciawi	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang			15				
							Jumlah pendampingan calon peserta KB Pria								
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah II Jonggol	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang			52				
							Jumlah peserta pembentukan kelompok KB Pria				60				
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang			7				
							Jumlah Peserta KIE MOP				20				
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang			15				
							Jumlah peserta pembinaan paguyuban KB pria				40				
					13	Peningkatan Kesertaan KB Pria UPT PPA Wilayah V Leuwisadeng	Jumlah Kesertaan KB Pria meningkat	Orang			20				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya kegiatan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	Kegiatan			131				
2	14	03	2			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan ditingkatkan di Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%			100,00				
					02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Orang			90				
					03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan program KKBPK di Kampung KB	Orang			30				
							Terlaksananya pengelolaan program bangga kencana	Kecamatan			40				
					04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	Orang			80				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber- KB	%			95,79				
							Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	%			95,00				
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%			100,00				
					01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Pembentukan Kelompok UPPKS	Kelompok			15				
							Jumlah Pembentukan Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB,BKR,BKL)	kelompok			30				
					02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok BKB Kit , BKR Kit, dan BKL Kit yang tersedia	Lembar			5.000				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS) yang mengikuti Pelatihan	orang			65				
					04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan UPPKS) yang mengikuti Pelatihan Teknis	Orang			130				
					06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya operasional kegiatan edukasi pengasuhan 1000 HPK	orang			122.777				
					07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Kelompok			110				
					08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta Lomba Kelompok Ketahanan Keluarga	Orang			35				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					09	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga	Orang			33				
					10	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga	Orang			30				
					11	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga	Orang			40				
					12	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga	Orang			90				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	%			100				
					02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya yang diberdayakan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan yang diberdayakan	Kelompok							
							Terlaksananya pemilihan Duta Genre Kabupaten Bogor Tahun 2021	orang			0				
					04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Kelompok PIK Remaja	Orang			120				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya yang diberdayakan dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Pendewasaan Usia Perkawinan yang diberdayakan	Organisasi			2				
							Terbinanya kelompok PIK Remaja				2				
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%			99,91				
2	08	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%			17				
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Transisi Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen FORUM RENJA PD	Dokumen			3				
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1				
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokkumen			1				
							Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja PD	Dokumen			1				
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokkumen			1				
							Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja PD	Dokumen			1				
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah SKPD	Dokumen			3				
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan PD	Laporan			4				
							Jumlah Tayangan Publikasi Kinerja PD	media			4				
2	08	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat daerah	%			100,00				
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPM/SPP Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen			36				
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			2				
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Register SPP/SPM Belanja	Dokumen			2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen			1				
					06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Hasil Pemeriksaan	Dokumen							
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	Laporan			12				
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen			1				
2	08	01	2	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	%			100,00				
					01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai yang dikelola oleh perangkat daerah	bulan			12				
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas	stell			170				
2	08	01	2	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Perangkat Daerah	%			100,00				
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			24				
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Unit			10				
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jumlah bahan logistik kantor	jenis			2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis			8				
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	Jenis			7				
					08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makanan dan minuman	Orang			1.500				
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilakukan	Provinsi dan kecamatan			46				
2	08	01	2	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	%			100,00				
					02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit			0				
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis			5				
					11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit			2				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	01	2	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100,00				
2	08	01	2	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Telepon,Listrik,Air dan Internet	bulan			12				
2	08	01	2	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pengamanan Kantor dan Petugas Jasa Kebersihan	bulan			12				
2	08	01	2	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%			99,00				
2	08	01	2	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan	Unit			314				
2	08	01	2	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Gedung			1				
2	08	01	2	01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Unit			121				

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
TAHUN 2023															
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja tangsung APBD	%				35,00			
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terbentuknya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di SKPD Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				4			
2	08	02	2	01	08	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah				0			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	02	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penguatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	02	2	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen				6			
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio				0,0059			
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	03	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				300			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				50			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				50			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				50			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				50			
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang				50			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan				4			
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan				8			
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan				3			
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan				5			
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Layanan				4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang				40			
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan	%				3,56			
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	04	2	01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%				100,00			
2	08	04	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				40			
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak	%				100,00			
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen				1			
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak	%				100,00			
2	08	06	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	06	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi				4			
2	08	06	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3			
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diberi penguatan di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	08	06	2	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokummen				1			
2	08	06	2	02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokummen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi	%				0,00011			
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan lintas sektor	%				100,00			
2	08	07	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah				20			
2	08	07	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3			
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				150			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				0			
2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				0			
2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				0			
2	08	07	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang				0			
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				40			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				5			
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				8			
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				5			
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				4			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan				9			
2	08	07	2	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				3			
2	08	07	2	02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	08	07	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
						Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang disinergikan	%				100,00			
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan kabupaten bogor yang bersinergi dengan provinsi	%				100,00			
2	14	02	2	01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana))	Dokumen				1			
2	14	02	2	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen				1			
2	14	02	2	01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta pertemuan dan sosialisasi hasil pemutakhiran data keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta pertemuan dan sosialisasi hasil pemutakhiran data keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta pertemuan dan sosialisasi hasil pemutakhiran data keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta pertemuan dan sosialisasi hasil pemutakhiran data keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyusunan Buku Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	%				0,00			
2	14	02	2	02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit				5			
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan				40			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	02	2	02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen				40			
2	14	02	2	02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan				1			
2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen				516			
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	%				13,04			
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%				100,00			
2	14	03	2	01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi				72			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen				1			
2	14	03	2	01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen				2			
2	14	03	2	01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan				1			
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				1			
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				1			
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				1			
2	14	03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan				1			
2	14	03	2	01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Dokumen				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%				100,00			
2	14	03	2	02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi				40			
2	14	03	2	02	03	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan				12			
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				435			
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				181			
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				0			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				0			
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				0			
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang				186			
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten Bogor	%				100,00			
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan				0			
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang				0			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen				12			
2	14	03	2	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit				4			
2	14	03	2	03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan				1			
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang				35			
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang				60			
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang				25			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang				30			
2	14	03	2	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang				60			
2	14	03	2	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan				3			
2	14	03	2	03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang				40			
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang				50			
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang				50			
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang				17			
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang				50			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang				40			
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan ditingkatkan di Kabupaten Bogor Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%				100,00			
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen				2			
2	14	03	2	04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung				2			
2	14	03	2	04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan				2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber- KB	%				93,35			
							Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	%				107,43			
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Jumlah Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%				100,00			
2	14	04	2	01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok				0			
2	14	04	2	01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit				0			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan				1			
2	14	04	2	01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang				0			
2	14	04	2	01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang				0			
2	14	04	2	01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan				2			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan				1			
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan				1			
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan				1			
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan				1			
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	%				100,00			
2	14	04	2	02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi emasyarakatatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan				1			
2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%				100,00			
2	14	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%				100,00			
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				2			
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				1			
2	14	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1			
2	14	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2			
2	14	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				2			
2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				1			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				4			
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat daerah yang tersedia	%				100,00			
2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPM/SPP Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				36			
2	14	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				2			
2	14	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				1			
2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1			
2	14	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1			
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester SKPD	Laporan				12			
2	14	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				2			
2	14	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah yang dilaporkan	%				100,00			
2	14	01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				9			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah yang dilaporkan	%				100,00			
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				24			
2	14	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				1			
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				2			
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				9			
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis				10			
2	14	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				9			
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				46			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	%				100,00			
2	14	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				3			
2	14	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				2			
2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%				100,00			
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12			
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				12			
2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	%				100,00			
2	14	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				0			

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1			
2	14	01	2	09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				35			
TAHUN 2024															
2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%					35,27	35,10	99,52
2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelembagaan PUG	%					100,00	100,00	100,00
2	08	02	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					1	1	100,00
2	08	02	2	01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peranngkat Daerah					23	23	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%					100,00	100,00	100,00
2	08	02	2	02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dok					1	1	100,00
2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%					100,00	100,00	100,00
2	08	02	2	03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dok					1	1	100,00
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	rasio					2,2	4,37	50,34
2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%					100,00	100,00	100,00
2	08	03	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%					100,00	100,00	100,00
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA I	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang					25	25	100,00
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA II	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang					30	30	100,00
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA III	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang					50	50	100,00
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA IV	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang					50	50	100,00
2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA V	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang					50	50	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA I	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					8	8	100,00
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA II	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					7	7	100,00
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA III	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					7	7	100,00
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA IV	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					7	7	100,00
2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA V	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan					7	7	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Relawan PPA yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%					100,00	100,00	100,00
2	08	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang					30	30	100,00
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan	%					3,68	3,65	99,18
2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	%					0,002	0,002	100,00
2	08	04	2	01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%					0,0026	0,0026	100,00
2	08	04	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					85	85	100,00
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%					34,15	34,15	100,00
2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%					100,00	100,00	100,00
2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen					2	2	100,00
2	08	05	2	01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					2	2	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Poin					710	639,91	90,13
2	08	06	2	01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%					100,00	100,00	100,00
2	08	06	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi					40	40	100,00
2	08	06	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					5	5	100,00
2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%					100,00	100,00	100,00
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah I	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah II	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinga Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00
2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	06	2	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					1	1	100,00
2	08	06	2	02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					25	25	100,00
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%					100,00	100,00	100,00
2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga/SKPD yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%					100,00	100,00	100,00
2	08	07	2	01	03	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KTA Terpadu	Kegiatan					3	3	100,00
2	08	07	2	01	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang					60	60	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%					100,00	100,00	100,00
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah I	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang					150	150	100,00
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah II	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang					30	30	100,00
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang					150	150	100,00
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang					100	100	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang					330	330	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					1697	1697	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA I	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					10	10	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA II	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					10	10	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA III	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					10	10	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA IV	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					10	10	100,00
2	08	07	2	02	07	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA V	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	orang					10	10	100,00
2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%					100,00	100,00	100,00
2	08	07	2	03	05	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan					1	1	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	08	07	2	03	06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang					42	42	100,00
2	08	07	2	03	07	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen					1	1	100,00
						Bidang Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana									
2	14	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point					71,25	71,25	100,00
2	14	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Point					71,25	71,25	100,00
2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					6	6	100,00
2	14	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen					3	3	100,00
2	14	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					3	3	100,00
2	14	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					6	6	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					6	6	100,00
2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan					3	3	100,00
2	14	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					12	12	100,00
2	14	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	%					100,00	100,00	100,00
							Persentase SPM yang Menjadi SPPD Tepat Waktu						95,00	95,00	100,00
							Persentase Kegiatan Yang Terpenuhi Kewajiban Pembayaranannya						100,00	100,00	100,00
							Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu						100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan					159	159	100,00
2	14	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen					6	6	100,00
2	14	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen					3	3	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan					3	3	100,00
2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					9	9	100,00
2	14	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					6	6	100,00
2	14	01	2	02		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%					100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	02	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					27	27	100,00
2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	%					90,00	90,00	100,00
							Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%					100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					18	18	100,00
2	14	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					3	3	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					6	6	100,00
2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					24	24	100,00
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen					30	30	100,00
2	14	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					36	36	100,00
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					36	36	100,00
2	14	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%					100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					24	24	100,00
2	14	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	1	100,00
2	14	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					24	24	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	01	2	07	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					3	3	100,00
2	14	01	2	07		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%					100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					36	36	100,00
2	14	01	2	07	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					36	36	100,00
2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%					100,00	100,00	100,00
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					624	624	100,00
2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					306	306	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	%					33,33	33,33	100,00
2	14	02	2	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangkaPengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%					100,00	100,00	100,00
2	14	02	2	01	18	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan					3	3	100,00
2	14	02	2	01	20	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	dokumen					3	3	100,00
2	14	02	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%					100,00	100,00	100,00
2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan					45	45	100,00
2	14	02	2	02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	dokumen					3	3	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	02	2	02	11	Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan					12	12	100,00
2	14	02	2	02	11	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen					3	3	100,00
2	14	02	2	02	11	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit					15	15	100,00
2	14	02	2	02	18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan					72	72	100,00
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%					9,67	9,79	101,24
2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%					100,00	100,00	100,00
2	14	03	2	01	10	Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan					12	12	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan					2	2	100,00
2	14	03	2	01	12	Promosi Dan Kie Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen					1	1	100,00
2	14	03	2	01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen					3	3	100,00
2	14	03	2	01	14	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi					72	72	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%					100,00	100,00	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					301	301	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA I	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					295	295	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA II	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					271	271	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA III	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					331	331	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA IV	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					1143	1143	100,00
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA V	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang					345	345	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	02	05	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi					9	9	100,00
2	14	03	2	02	06	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan					9	9	100,00
2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%					100,00	100,00	100,00
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan					12	12	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	03	2	03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang					4965	4965	100,00
2	14	03	2	03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen					37	37	100,00
2	14	03	2	03	16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang					132	132	100,00
2	14	03	2	04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%					100,00	100,00	100,00
2	14	03	2	04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen					3	3	100,00
2	14	03	2	04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	Kampung					10	10	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%					77,54	84,05	108,40
2	14	04	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%					100,00	100,00	100,00
2	14	04	2	01	16	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Ppks)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan					2	2	100,00
2	14	04	2	01	17	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan					6	6	100,00
2	14	04	2	01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit					49	49	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	01	19	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang					2019	2019	100,00
2	14	04	2	01	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan					3	3	100,00
2	14	04	2	01	28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok					67	67	100,00

KODE						PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
									REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2	14	04	2	02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%					100,00	100,00	100,00
2	14	04	2	02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan					6	6	100,00
2	14	04	2	02	05	Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan					1	1	100,00
2	14	04	2	02	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan					1	1	100,00

Berdasarkan tabel 2.1, hampir seluruh indikator Program, kegiatan dan sub kegiatan realisasinya tercapai. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya realisasi, yaitu:

1. Terbinanya MOTEKAR, GUGUS PPA, SATGAS PPA, PUSPAGA, PATBM, Forum Anak, P2TP2A, Forum PUSPAGA, LSM Perempuan dan Anak di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Terlaksananya penyuluhan dan penggerakan Kepada Keluarga dan Pasangan Usia Subur
3. Terbinanya Tenaga Penggerak Desa (TPD), Penyuluh KB (PKB) Kader Pos KB dan Sub Pos KB Desa dan kelompok Tribina
4. Terjalinnnya kerjasama program Bangga Kencana dengan OPD dan Faskes

Beberapa Indikator Program yang belum tercapai pada Tahun 2024 yaitu Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD dengan target 35,27 %, realisasi 35,10 %, sehingga memiliki capaian sebesar 99,52%; Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan target rasio 2,20, realisasi 35,10, sehingga memiliki capaian sebesar 50,34 %; Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan dengan target 3,68 %, realisasi 3,65 %, sehingga memiliki capaian sebesar 99,18%; Kategori Kabupaten Layak Anak dengan target 710 poin, realisasi 639,31 poin, sehingga memiliki capaian sebesar 90,13 %. Faktor penghambat yang memengaruhi belum tercapainya indikator program tersebut, diantaranya:

1. Terbatasnya jumlah SDM di DP3AP2KB
2. Kurangnya Kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah mengenai Anggaran Responsif Gender (ARG)
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk melaporkan kasus keekrasan terhadap perempuan
4. Kurangnya ruang bermain dan berolahraga bagian anak

Upaya yang akan dilaksanakan DP3AP2KB Tahun 2026 untuk memenuhi tercapainya indikator, yaitu

1. Perlunya pengkoordinasian dengan Lintas Sektor berkaitan dengan data IPG dan IDG
2. Menambah ruang bermain dan berolahraga bagian anak dan remaja
3. Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tata cara pelaporan jika terjadi kasus

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3AP2KB

Sesuai dengan peraturan perundangan terutama Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka disusun Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Seperti yang tercantum dalam Bab II Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 dan 3 dengan jelas disebutkan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan tugas pembantuan.

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor yang dimaksudkan adalah kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) untuk urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun lingkup pelayanan urusan wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Bogor

I. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, dan 13 (Tiga Belas) Sub Koordinator dengan Jabatan Fungsional dan 5 (Lima) Unit Peakana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, membawahkan :
Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Secara lengkap Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar.2.2.

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

B. Bagian Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- c. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
- d. Pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
- f. Pengelolaan keuangan Dinas;
- g. Pengelolaan situs *web* Dinas;
- h. Pelaksanaan dan pengoordinasian penilaian reformasi birokrasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
 - c. Pengelolaan barang/jasa Dinas;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
 - f. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
 - g. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. Penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. Penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - d. Pengordinasian penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud merupakan kelompok substansi bidang program dan pelaporan yang memiliki tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (1) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur Sub Koordinator Program dan Pelaporan.
 - (2) Sub Koordinator Program dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang program dan pelaporan dalam :
 - a. Menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. Mengelola penyusunan anggaran Dinas; dan

- d. Mengelola situs *web* Dinas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga;
 - e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Perempuan serta Peningkatan Kualitas Keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
 - b. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- (3) Masing-masing kelompok substansi dipimpin oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :
 - a. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga;
1. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perlindungan perempuan;
 - b. Melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c. Meminimalisir kekerasan terhadap perempuan;
 - d. Menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. Melaksanakan koordinasi pengelolaan perlindungan perempuan;
 - f. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;

- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - c. Melaksanakan kebijakan dan fasilitasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan serta pendampingan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga;
 - b. Melaksanakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - c. Menyediakan, menguatkan, dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - d. Membina dan memfasilitasi pengelolaan peningkatan kualitas keluarga;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;
 - c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak
 - e. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta data dan informasi gender dan anak.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Kelompok Substansi Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Kelompok Substansi Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
 - (3) Masing-masing kelompok substansi dipimpin oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :
 - a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak; dan
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak.
1. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pemenuhan Hak Anak dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak;

- b. Melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - c. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - d. Membina dan fasilitasi pemenuhan hak anak;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang perlindungan khusus anak dalam :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak;
 - b. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - c. Melaksanakan penyediaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perlindungan khusus anak;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
3. Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi anak;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data gender dan anak;
 - c. Menyediakan data gender dan anak;
 - d. Menyajikan dan memanfaatkan data gender dan anak;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi data gender dan anak;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

E. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga;
 - c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera serta data dan informasi keluarga.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
 - b. Kelompok Substansi Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Kelompok Substansi Data dan Informasi Keluarga.
 - (3) Masing-masing kelompok substansi dipimpin oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :

- a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;
 - b. Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga.
1. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pengendalian Penduduk dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk;
 - b. Melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - c. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengendalian penduduk;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
 2. Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dalam:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi bidang Data dan Informasi Keluarga dalam:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan data dan informasi keluarga;
- b. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan dan pemanfaatan hasil pemutakhiran data keluarga;
- c. Melaksanakan pengolahan, penyediaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan keluarga berencana;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta pemutakhiran data keluarga.
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

F. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana serta pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
- b. Penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keluarga berencana;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, jaminan pelayanan keluarga berencana dan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, Jaminan Pelayanan keluarga

- berencana dan Pendayagunaan Pengelola keluarga berencana dan Institusi Masyarakat;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pembinaan Keluarga Berencana; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan Advokasi dan KIE, Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana serta Pendayagunaan Pengelola Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat.
 - (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok substansi, yaitu:
 - a. Kelompok Substansi Advokasi dan KIE;
 - b. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Kelompok Substansi Pendayagunaan Pengelola KB dan Institusi Masyarakat.
 - (3) Masing-masing kelompok substansi dipimpin oleh Seorang Sub Koordinator dengan nomenklatur :
 - a. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
 - b. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB; dan
 - c. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola KB dan Institusi Masyarakat.
- 1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang Advokasi dan KIE dalam :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. Melaksanakan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

- d. Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. Melaksanakan penyediaan dan distribusi sarana komunikasi, informasi dan edukasi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 - f. Mengelola dan mengendalikan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana;
 - g. Membina dan fasilitasi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
2. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang Jaminan Pelayanan keluarga berencana dalam :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. Melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang;
 - d. Melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang.
 - e. Menyusun rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan keluarga berencana.
 - f. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
 - g. Melaksanakan dukungan operasional pelayanan keluarga berencana.
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Koordinator Pendayagunaan Pengelola keluarga berencana dan Institusi Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan kelompok substansi Bidang sarana dan prasarana penyuluhan dalam :
- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan pengelola keluarga berencana dan institusi masyarakat;
 - b. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana /petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. Melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan/kelurahan dan penggerakan kader institusi msyarakat pedesaan/kelurahan (IMP);
 - d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP3AP2KB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) DP3AP2KB mempunyai tugas menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan/atau saksi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT DP3AP2KB mempunyai fungsi :

- a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan UPT;
- c. penjaminan kualitas pelayanan dalam UPT;
- d. penyediaan tata tertib penyelenggaraan UPT;
- e. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian aduan masyarakat; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penyelenggara UPT.

(1) Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT

(2) Subbagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan ketatausahaan UPT, dipimpin oleh seorang kepala Subbagian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (a) penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- (b) pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- (c) penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- (d) pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- (e) pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
- (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Nomor 8 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor yang dimaksudkan adalah kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Hasil tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) untuk urusan wajib Non Pelayanan Dasar dan/atau indikator kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, serta urusan wajib Non Pelayanan

Dasar Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DP3AP2KB HINGGA TAHUN 2024

URUSAN : NON URUSAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
TAHUN 2019									
1	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	%							
2	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%							
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%							

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
4	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	%							
5	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevelance Rate (CPR)	%							
6	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (DO)	%							
7	Cakupan Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS)yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%							

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
TAHUN 2020									
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	1,25						
2	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga Swasta	%	18,26						
3	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%	10,00						
4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00						
5	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	%	100,00						
6	Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevalance Rate (CPR)	%	73,76						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
7	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (DO)	%	11,83						
8	Cakupan Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS)yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%	14,01						
TAHUN 2021									
	TUJUAN								
1	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan			23,06					
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga			2,12					
	SASARAN								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%		27,91					
2	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%		72,50					
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)	%		74,25					

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
TAHUN 2022									
	TUJUAN								
1	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%			8,43				
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Point			2,17				
	SASARAN								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%			28,76				
2	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%			100,00				
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)	%			61,70				
TAHUN 2023									
	TUJUAN								
1	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%				7,92			
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Point				2,17			

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024		
			REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (9/8)x100%
	SASARAN								
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%				30,33			
2	Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	%				100,00			
3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)	%				66,69			
TAHUN 2024									
	TUJUAN								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin					90,77	90,17	99,34
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)	%					61,79	66,69	107,92
	SASARAN								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin					59,35	56,99	96,02
2	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%					11,00	8,38	131,26

Berdasarkan Rencana Strategis DP3AP2KB Tahun 2024-2026, pada Tahun 2024 DP3AP2KB Kabupaten Bogor telah menetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran. Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DP3AP2KB tahun 2024 sebagai berikut :

A. INDIKATOR TUJUAN

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 sebesar 90,17 % dibandingkan dengan target sebesar 90,77 % atau tercapai 99,34 %.

2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)

Realisasi Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR) 2024 sebesar 66,69 % dibandingkan dengan target sebesar 61,79 % atau tercapai 107,92 %.

B. INDIKATOR SASARAN

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2024 sebesar 56,99 % dibandingkan dengan target sebesar 59,35 % atau tercapai 96,02 %..

2. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) tahun 2024 sebesar 8,38 % dibandingkan dengan target sebesar 11,00% atau tercapai 131,26%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencapaian indikator kinerja, adalah:

- a) Meningkatnya Kualitas Perangkat Daerah tentang Standar Pengarusutamaan Gender (PUG)
- b) Meningkatnya Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
- c) Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
- d) Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Hak Anak Melalui Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor
- e) Terwujudnya Kualitas Keluarga dan Hak Anak melalui Penyediaan Layanan bagi Keluarga yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten Bogor

- f) Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- g) Tersedianya Cangkupan Data Program Bangga Kencana
- h) Meningkatnya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
- i) Tersedianya Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK
- j) Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB
- k) Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- l) Terbinanya kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga
- m) Pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pencapaian indikator tujuan dan sasaran didukung oleh program-program yang tercantum dalam rencana strategis tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan 4 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 99,52 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,95 %.
- 2) Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 Kegiatan 4 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 50,34 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,19 %.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 99,18 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,97 %.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100,00 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,21 %
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 Kegiatan 5 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 90,13 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,05 %

- 6) Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100,00 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,51 %
- 7) Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 Kegiatan 8 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100,00 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,93 %
- 8) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 Kegiatan 14 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 101,24 % dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,50 %
- 9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 Kegiatan 9 Sub Kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 108,40 %, serta tingkat capaian anggaran sebesar 99,91 %.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3AP2KB

Dalam menetapkan isu-isu strategis, maka perlu memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran DP3AP2KB dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan di DP3AP2KB dilakukan analisis permasalahan dan isu-isu strategis untuk meningkatkan kinerja dinas dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam program prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 kegiatan 4 Sub kegiatan dengan indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) diharapkan dapat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
2. Program Perlindungan Perempuan terdiri dari 3 Kegiatan 4 Sub Kegiatan dengan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif diharapkan dapat mencegah dan menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga terdiri dari 2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan dengan indikator Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar diharapkan dapat

Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif, Khususnya Yang Dikelola Perempuan.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terdiri dari 1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan dengan indikator Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan diharapkan dapat tersusunnya dan optimalnya Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari 2 Kegiatan 5 Sub Kegiatan dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) diharapkan dapat meningkatkan optimalnya Pemenuhan Hak Anak.
6. Program Perlindungan Khusus Anak terdiri dari 3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan dengan indikator Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif diharapkan dapat mencegah dan menurunkan tindak kekerasan terhadap anak.
7. Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 Kegiatan 8 Sub kegiatan dengan indikator Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) diharapkan dapat meningkatkan optimalnya grand design dan pendataan keluarga.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terdiri dari 4 Kegiatan 14 Sub Kegiatan dengan indikator Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) diharapkan dapat meningkatkan optimalnya Kesadaran Keluarga untuk ber-KB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 Kegiatan 9 Sub Kegiatan dengan indikator Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga diharapkan dapat meningkatkan optimalnya Pemahaman Keluarga tentang Fungsi Keluarga dan Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga.

Isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan DP3AP2KB, yaitu:

1. Terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) secara Berkelanjutan
2. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
3. Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender
4. Pemenuhan Hak Anak
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
6. Fungsi Keluarga dalam Upaya Pencegahan Stunting

Hasil analisis antara kekuatan dan peluang serta tantangan dan ancaman di DP3AP2KB Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

A. Kekuatan dan Peluang

- Aspek kelembagaan, merupakan kekuatan yang mampu mendukung pencapaian Index Pemberdayaan Gender (IDG)
- Memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan kegiatan (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat edaran Bupati
- Adanya komitmen para stakeholder dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Kabupaten Bogor
- Adanya Sumber daya pendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (motivator ketahanan keluarga, Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Satuan Tugas PPA, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) , dan Wanoja Mitandang dalam mendukung program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Tersedianya SIGADIS sebagai data mikro program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Aspek kelembagaan, merupakan kekuatan yang mampu mendukung pencapaian Total Fertility Rate (TFR) dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))
- Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola program Bangga Kencana mampu mendukung pencapaian Total Fertility Rate (TFR) dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))
- Tersedianya Data Mikro keluarga program Bangga Kencana

B. Tantangan dan Ancaman

- Kelembagaan Sub urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih bersatu dengan sub urusan lainnya (sub urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- Kurangnya Jumlah SDM Internal di DP3AP2KB
- Sarana dan prasarana kurang memadai
- Kurangnya ketersediaan data terpilah dari masing-masing Perangkat Daerah
- Unmet Need merupakan ancaman untuk tercapainya TFR
- Penggerakan untuk pelayanan KB masih menjadi tantangan dari tercapainya TFR

- Kemitraan dengan lintas sektor masih merupakan tantangan yang harus ditingkatkan dalam mendukung pencapaian TFR dan Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))
- Rendahnya Usia Kawin Pertama Wanita (UKPW) dalam mendukung tercapainya TFR

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AP2KB

hasil analisis antara tantangan dan peluang di DP3AP2KB Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk melaksanakan koordinasi, sehingga tercipta Sinergitas dengan dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi
- 2) Mengatasi ketidaktersediaan data terpilah, SOP dan SPM dengan berkoordinasi dan bersinergi untuk memperoleh komitmen dan partisipasi masyarakat
- 3) Mengatasi kekurangan jumlah petugas lapangan KB dengan berkoordinasi ke Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan peran lembaga/organisasi masyarakat, institusi masyarakat dan kelompok kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja DP3AP2KB

Penyusunan rancangan awal Renja DP3AP2KB dengan hasil anailis kebutuhan terdapat perbedaan pada anggaran. Hal ini disebabkan karena kondisi kebutuhan keuangan dinas, sehingga terjadinya kenaikan anggaran sebesar Rp. 24.479.007.405 pada hasil anailis kebutuhan, sedangkan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan terdapat perubahan antara rancangan awal Renja DP3AP2KB dengan hasil analisis kebutuhan karena adanya penyesuaian sub kegiatan yang mendukung visi misi pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3

URUSAN / UNSUR
 BIDANG URUSAN
 PERANGKAT DAERAH

: NON PELAYANAN DASAR
 : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TABEL 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

KABUPATEN BOGOR

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35,73	1.840.878.308	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	33,14	3.966.651.993	
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelebagaan PUG	%	100,00	337.800.615	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelebagaan PUG	%	100,00	1.533.899.818	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	149.999.875	
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	133.900.615	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	233.900.318	
1.1.3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG ditingkat kab/kota	Kebijakan	1	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG ditingkat kab/kota	Kebijakan	1	500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.4							Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	499.999.625	
1.1.5	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	2	53.900.000	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	2	150.000.000	
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100,00	129.675.204	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100,00	599.350.125	
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang		129.675.204	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang		129.675.100	
1.2.2							Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	60	469.675.025	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	1.373.402.489	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	1.833.402.050	
1.3.1	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	4	840.000.000	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	4	600.000.000	
1.3.2	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	60	200.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	120	399.999.900	
1.3.3	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	1	333.402.489	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	1	833.402.150	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,00	490.567.797	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	789.253.600	
2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%	100,00	60.631.179	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	%	100,00	250.126.625	
2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	1	60.631.179	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	1	250.126.625	
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	304.936.618	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	337.326.375	
2.2.1	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	10	304.936.618	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	10	337.326.375	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Relawan PPA yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	125.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Relawan PPA (Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan) yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	201.800.600	
2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	100	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	100	201.800.600	
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi oleh Perempuan	%	4,18	3.743.834.951	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	33,56	4.213.034.500	
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0,0020	3.363.040.794	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0,0020	3.363.040.650	
3.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1500	3.363.040.794	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1500	3.363.040.650	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%	0,0026	248.794.157	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	%	0,0026	717.993.850	
3.2.1	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	132.000.000	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	131.999.900	
3.2.2	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	2	116.794.157	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	2	585.993.950	
3.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	%	100,00	132.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	%	100,00	132.000.000	
3.3.1	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	144	132.000.000	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	144	132.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	100,00	645.465.261	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	13,47	645.465.261	
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%	100,00	645.465.261	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Kuantitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data	%	100,00	645.465.261	
4.1.1	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	323.655.347	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	323.655.347	
4.1.2	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	1,00	121.809.914	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga	1	121.809.914	
4.1.3	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1,00	200.000.000	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Utama	1.093.689.377	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,15	1.125.882.268	
5.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%	100,00	948.093.083	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	%	100,00	980.442.443	
5.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3	77.905.927	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3	100.462.075	
5.1.2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	370.000.000	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	369.983.125	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.1.3	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	500.187.156	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	509.997.243	
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	145.596.294	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan	%	100,00	145.439.825	
5.2.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	145.596.294	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	145.439.825	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	1.235.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	1.856.648.743	
6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga/SKPD yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100,00	535.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga/SKPD yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100,00	956.648.743	
6.1.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	75.000.000	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	252.369.993	
6.1.2	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	100.000.000	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	344.278.800	
6.1.3	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	100	360.000.000	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	100	359.999.950	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%	100,00	700.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%	100,00	900.000.000	
6.2.1	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	700.000.000	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	900.000.000	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP	Predikat	BB	18.747.966.196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	19.479.664.368	
7.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100,00	614.916.497	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100,00	503.597.268	
7.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	264.410.103	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	178.253.643	
7.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	21.871.537	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	23.450.525	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	16.428.261	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	16.427.825	
7.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	64.440.123	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	76.569.575	
7.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	14.434.393	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	14.434.325	
7.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	16.920.338	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	16.917.700	
7.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	141.411.742	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	132.888.175	
7.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	75.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	44.655.500	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,00	12.007.229.655	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,00	12.007.228.769	
7.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	53	11.677.520.783	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	53	11.677.520.783	
7.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	225.583.783	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	225.583.536	
7.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	19.986.878	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	19.986.750	
7.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22.707.202	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22.707.025	
7.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	47.250.071	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	47.250.050	
7.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	14.180.938	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	14.180.625	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	90,00	244.762.962	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	90,00	241.261.620	
7.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	9	244.762.962	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	9	241.261.620	
7.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	80,00	888.667.406	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	80,00	875.778.043	
7.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	416.617.538	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	338.894.750	
7.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	21.943.780	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	21.932.575	
7.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	108.251.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	124.130.500	
7.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	43.539.228	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	49.905.800	
7.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	4.044.510	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	4.044.250	
7.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	34.443.100	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	34.435.500	
7.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	259.828.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	302.434.668	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	80,00	2.173.502.790	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	80,00	2.384.113.250	
7.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1.199.874.225	
7.5.2	Pengadaan Mebel	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	154.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	153.909.725	
7.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	819.502.790	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1.030.329.300	
7.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90,00	1.437.763.286	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90,00	1.503.071.900	
7.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	840.509.100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	840.505.200	
7.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	597.254.186	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	662.566.700	
7.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	70,00	1.381.123.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	70,00	1.964.613.518	
7.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	218	857.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	218	857.100.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	341.925.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	925.742.850	
7.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	105	182.198.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	105	181.770.668	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase Kebijakan yang disinergikan	%	100,00	648.686.645	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	16,30	1.611.286.998	
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100,00	289.871.193	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100,00	389.871.950	
8.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	155.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	255.000.750	
8.1.2	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	134.871.193	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	134.871.200	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,00	358.815.452	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,00	1.221.415.048	
8.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	1	91.937.988	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	2	60.000.000	
8.2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	144.006.042	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	2	59.619.825	
8.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	24	87.893.317	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	556.522.425	
8.2.4	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	5	34.978.105	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	14	386.710.143	
8.2.5							Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	1	23.584.550	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.2.6							Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	5	134.978.105	
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	5.561.601.053	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,20	8.935.705.489	
9.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	300.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	1.369.020.000	
9.1.1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	300.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		321.300.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.1.2							Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	399.000.000	
9.1.3							Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	100.000.000	
9.1.4							Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	300.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.1.5							Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	72	248.720.000	
9.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	4.295.957.995	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	5.757.490.562	
9.2.1	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	323.346.564	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1740	1.740.000.000	
9.2.2	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	4.295.957.995	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	514.173.250	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.2.3							Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	3.503.317.312	
9.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%	100,00	674.903.986	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%	100,00	1.089.080.751	
9.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1815	674.903.986	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1815	825.528.801	
9.3.2							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	263.551.950	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100,00	290.739.072	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100,00	720.114.176	
9.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	12	290.739.072	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	12	720.114.176	
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang Ber-KB	%	77,90	1.944.526.829	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	4,05	8.319.056.636	
10.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	1.904.868.474	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	2.368.026.736	
10.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	453.362.679	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	9.900.000	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	23	107.648.437	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	453.236.175	
10.1.3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	738	790.491.185	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	23	107.661.425	
10.1.4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	458.142.723	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	738	790.500.525	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.1.5	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	23	548.586.129	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	458.142.500	
10.1.6							Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	23	548.586.111	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	39.658.355	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	5.951.029.900	
10.2.1							Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	3.194.616.700	
10.2.2							Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	2.716.607.100	
10.2.3	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	2	39.658.355	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	2	39.806.100	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UPT PPA WILAYAH TENGAH					1.123.107.700	UPT PPA WILAYAH TENGAH					1.223.107.600	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,00	263.524.800	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	521.664.325	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	263.524.800	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	521.664.325	
1.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	192.024.800	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	159.656.375	
1.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	76	71.500.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	76	362.007.950	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	859.582.900	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	701.443.275	
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	859.582.900	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	701.443.275	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	740.782.900	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	159.475.275	
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	202	118.800.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	202	541.968.000	
	UPT PPA II WILAYAH TIMUR					333.353.790	UPT PPA WILAYAH TIMUR					733.353.300	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,00	117.997.990	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	317.997.725	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	117.997.990	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	317.997.725	
1.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	76.857.990	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	46.858.125	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	35	41.140.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	126	271.139.600	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	215.355.800	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	415.355.575	
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,000	215.355.800	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,000	415.355.575	
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	147.716.800	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	43.641.725	
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	126	67.639.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	126	371.713.850	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UPT PPA WILAYAH BARAT					482.480.600	UPT PPA WILAYAH BARAT					882.480.775	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,00	105.180.600	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	305.180.925	
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	105.180.600	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	305.180.925	
1.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	36	66.680.600	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	36	86.681.225	
1.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	5	38.500.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5	218.499.700	

NO	RANCANGAN AWAL RENJA						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	377.300.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	577.299.850	
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	377.300.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	577.299.850	
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	303.600.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	187.069.850	
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	10	73.700.000	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	10	390.230.000	
	TOTAL					37.891.158.507	TOTAL					53.781.591.531	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Renja DP3AP2KB tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan seluruh pendekatan perencanaan serta kesesuaian substansi dengan tugas dan fungsi DP3AP2KB yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3), menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka menindak lanjuti pasal 7 ayat 3, DP3AP2KB Musrembang tahun 2025 untuk perencanaan tahun 2026. Usulan masyarakat disampaikan pada SIPD dengan dikaitkan dengan isu-isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB dituangkan dalam tabel 2.4.

TABEL 2.4
USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN BOGOR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOGOR

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	35,73	%	
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelebagaan PUG	100,00	%	
1.1.1	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Cibinong	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	Lembaga	Hibah
1.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			
1.2.1	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Cibinong	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1	lembaga	Hibah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi oleh Perempuan			
2.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak			
2.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Tanjungsari	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	pasangan	Musrembang
		Megamendung		50	pasangan	
		Tamansari		50	pasangan	
		Cibungbulang		50	pasangan	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	
3.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%	100	
3.1.1	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sukahati	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga	Hibah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga	2,05	Poin	
4.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	
4.1.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jasinga	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50	akseptor	Musrembang

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor Dalam upaya memenuhi tugas dan fungsi, melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis tidak terlepas prioritas Nasional dan Prioritas Daerah. Prioritas Nasional yang terdiri dari delapan prioritas ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor masuk ke dalam misi Asta Cita ke-4, yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dankesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk Tahun 2026 dituangkan pada Tabel 3.1. Sedangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Tabel 3.2.

TABEL 3.1
KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG)	33,14	%	3.966.651.993
		Program Perlindungan Perempuan	Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	%	1.934.096.575

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	33,56	%	4.213.034.500
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	13,47	%	645.465.261
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	59,15	Indeks	1.125.882.268
		Program Perlindungan Khusus Anak	Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	%	3.550.747.443

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
		Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun dalam Menekan Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	16,30	Angka	1.611.286.998
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	14,20	%	8.935.705.489
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	4,05	%	8.319.056.636

TABEL 3.2
KETERKAITAN PROGRAM DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG)	33,14	%	3.966.651.993
		Program Perlindungan Perempuan	Tertanganinya Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	%	1.934.096.575

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Keluarga Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	33,56	%	4.213.034.500
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	13,47	%	645.465.261
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terpenuhinya hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	59,15	Indeks	1.125.882.268
		Program Perlindungan Khusus Anak	Tertanganinya Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	%	3.550.747.443

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	14,20	%	8.935.705.489
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tercapainya keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	4,05	%	8.319.056.636

Dukungan terhadap kebijakan nasional yang akan dilaksanakan tahun 2025 dituangkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Tugas pokok : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan bidang Keluarga Berencana dan tugas pembantuan	
	Fungsi :	
	Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
	b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
	c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender / Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
	Program Perlindungan Perempuan	Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender / Sub Koordinator Perlindungan Perempuan
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender / Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Keluarga
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak / Sub Koordinator Data dan Informasi Gender dan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak / Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak / Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera / Sub Koordinator Pembinaan, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 tahun dalam Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Adapun Sasaran yang ingin dicapai DP3AP2KB, yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor pada Rencana Kerja 2026 tercantum pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN					
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1 – [(Indikator Kesehatan reproduksi x 1/3) + (Indikator Pemberdayaan x 1/3)+ (Indikator Partisipasi Angkatan Kerja x 1/3)	0,572	Poin
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	(Nilai Indeks Klaster Hak Sipil dan Kebebasan x 20%) + (Nilai Indeks Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif x 22%) + (Nilai Indeks Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan x 18%) + (Nilai Indeks Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya x 18%) + (Nilai Indeks Klaster Perlindungan Khusus x 22%) / 5	64,20	Poin

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
		Angka kelahiran total (TFR)	$TFR = \frac{1}{1000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right]$ Dengan Bi : Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i Pi : jumlah wanita kelompok umur $ASFR_i$:Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur	1,92	Anak
SASARAN					
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB		Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	Jumlah Penduduk perempuan yang bekerja / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100	35,93	%
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Capaian dari 31 Indikator KLA Pratama = 500-600 Madya = 601-700 Nindya = 701-800 Utama = 801-900 KLA = 901-1000	Madya	Kategori

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	Jumlah peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100	61,60	%

Sasaran Jangka Menengah DP3AP2KB merupakan tolok ukur yang diuraikan dari tujuan perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (Lima) tahun kedepan.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada sasaran kepala daerah. Tujuan merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2016 pasal 11 bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan wajib non Pelayanan dasar. Untuk itu keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran Kepala daerah kabupaten Bogor dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, yaitu pada:

- **Tujuan**
 - 1) Tujuan ke empat : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- **Sasaran**
 - 1) Sasaran ke tiga : Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana menetapkan tujuan dan indikator Dinas dengan mengacu pada sasaran Kepala daerah dengan menggunakan alat ukur tiga indikator untuk dua sub urusan sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin
		Angka kelahiran total (TFR)	Anak

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu satu tahun. Sasaran merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan indikator yang tepat untuk menghitung sejauhmana ketercapaian target.

Sasaran-sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kepesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk Ber-KB	Persentase Perempuan Usia Kerja yang Berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi	%
		Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR))	%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis DP3AP2KB periode tahun 2025-2029 yang telah disusun dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis DP3AP2KB tahun 2025-2029 merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan. Hal tersebut sebagai upaya guna mengakomodir rencana kerja DP3AP2KB dalam mendukung fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bogor.

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diencanakan tahun 2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tertuang dalam tabel 3.5

Tabel 3.5
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Sekretariat	1	7	30	19.479.664.368
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender	3	9	17	8.968.940.093
Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	3	5	11	3.627.996.272
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	2	4	17	9.930.343.634
Bidang Pembinaan Keluarga Berencana	1	4	11	8.935.705.489
UPT PPA Wilayah Tengah	2	2	4	1.223.107.600
UPT PPA Wilayah Timur	2	2	4	733.353.300
UPT PPA Wilayah Barat	2	2	4	882.480.775
TOTAL (Rp)				53.781.591.531

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

A. Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai, dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Adapun indikator program dan kegiatan, mengacu pada keselarasan dengan kinerja yang ingin dihasilkan, sedangkan indikator kegiatan mengacu pada ketetapan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dapat ditambahkan sesuai dengan kinerja penting lainnya bagi sub kegiatan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah, di luar yang telah ditetapkan. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan dalam tabel berikut :

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN : URUSAN NON PELAYANAN DASAR

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada Belanja APBD	%	35,10	292.721.078													
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%			33,61	677.177.274	33,14	4.059.358.616	31,00	3.897.596.078	31,84	3.888.973.371	31,33	4.054.885.161	29,76	4.308.642.261	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelembagaan PUG	%	100,00	105.932.934	34,38	33.657.084	59,38	1.383.899.818	56,25	1.364.940.646	50,00	1.207.687.678	53,13	1.252.072.063	62,50	1.298.175.665	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen					3	149.999.875	4	152.500.000	5	55.125.000	5	57.881.250	5	60.775.313	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	26.152.639	1	33.657.084											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan					1	233.900.318	1	240.595.646	1	147.625.428	1	155.006.700	1	162.757.034	
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peranngkat Daerah	23	79.780.295													
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG ditingkat provinsi	Kebijakan					3	500.000.000	4	205.250.000	4	215.512.500	4	226.288.125	4	237.602.531	
Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga					2	499.999.625	2	510.000.000	2	520.000.000	2	530.000.000	2	540.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga							2	256.595.000	2	269.424.750	2	282.895.988	2	297.040.787	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100,00	100.860.860			60,00	692.056.748	50,00	615.834.168	80,00	646.625.876	90,00	678.957.170	90,00	712.905.029	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.860.860													
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang					200	222.381.723	200	136.158.964	150	142.966.912	150	150.115.258	150	157.621.021	
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang					60	469.675.025	63	479.675.204	66	503.658.964	69	528.841.912	72	555.284.008	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	85.927.284													
	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%			75,00	643.520.190	77,00	1.983.402.050	78,00	1.916.821.264	79,00	2.034.659.817	80,00	2.123.855.928	81,00	2.297.561.567	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga			2	624.999.150											
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	85.927.284	2	18.521.040											
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga					4	750.000.000	4	621.749.112	4	674.834.056	4	696.038.880	4	911.629.688	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang					120	399.999.900	63	419.999.895	66	440.999.890	69	463.049.884	72	486.202.378	
Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga					1	833.402.150	1	875.072.257	1	918.825.871	1	964.767.164	1	899.729.501	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	211.323.859													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	50.348.685	100,00	834.456.345	100,00	769.189.020	100,00	811.918.105	100,00	846.767.766	100,00	914.690.039	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Bogor	%	100,00	94.960.789													
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	%			7,12	4.985.000	20,99	250.126.625	20,99	262.632.956	20,99	275.764.604	19,34	289.552.834	17,70	304.030.476	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	94.960.789	4	4.985.000											
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga					115	250.126.625	115	262.632.956	115	275.764.604	106	289.552.834	97	304.030.476	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%			100,00	11.924.110	100,00	337.326.375	100,00	294.665.434	100,00	313.668.340	100,00	323.605.512	100,00	365.369.672	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan			2	11.924.110											
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang					149	337.326.375	155	294.665.434	160	313.668.340	165	323.605.512	170	365.369.672	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Relawan PPA yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	116.363.070													
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%			9,12	33.439.575	35,04	247.003.345	35,58	211.890.630	35,95	222.485.161	36,31	233.609.420	36,68	245.289.891	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	30	116.363.070	50	33.439.575											
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang					192	247.003.345	195	211.890.630	197	222.485.161	199	233.609.420	201	245.289.891	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Pemenuhan Ekonomi Keluarga yang Dikontribusi Oleh Perempuan	%	3,65	286.306.849													
	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%			16,78	220.241.110	33,56	4.311.499.452	50,34	3.609.380.551	67,13	2.310.243.759	83,91	2.348.866.487	100,00	2.413.077.253	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0,002	244.494.849	24,05	119.474.110	27,49	3.363.040.650	23,51	3.209.546.686	19,17	1.409.680.111	18,81	1.400.261.657	20,43	1.436.559.182	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	244.494.849	2	119.474.110											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					1500	3.363.040.650	1000	3.209.546.686	350	1.409.680.111	350	1.400.261.657	350	1.436.559.182	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor yang terbina	%	0,0026	41.812.000													
	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	%			10,18	64.767.000	25,05	767.226.326	14,29	261.233.865	24,27	755.033.648	25,24	795.798.330	25,64	816.071.246	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	41.812.000	150	64.767.000											
Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga					43	181.232.376	38	138.600.000	23	139.740.000	31	149.740.000	22	137.710.000	
Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga					85	585.993.950	35	122.633.865	101	615.293.648	98	646.058.330	109	678.361.246	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%															
	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	%			8,41	36.000.000	13,70	181.232.476	22,11	138.600.000	22,70	145.530.000	23,87	152.806.500	25,44	160.446.825	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan			144	36.000.000											
Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang					11000	181.232.476	8000	138.600.000	9000	145.530.000	10000	152.806.500	10000	160.446.825	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak	%	34,15	157.961.199													
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%			6,74	97.368.557	13,47	660.550.754	20,21	662.475.120	26,95	711.188.965	33,68	758.514.410	40,42	824.399.479	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data di Kabupaten Bogor	%	100,00	157.961.199													
	Persentase Dokumen Gender dan Anak	%			100,00	97.368.557	100,00	660.550.754	100,00	662.475.120	100,00	711.188.965	100,00	758.514.410	100,00	824.399.479	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	115.148.099	2	84.365.584											
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	42.813.100	2	13.002.973											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen					2	323.655.347	2	318.138.512	2	342.748.794	2	396.491.717	2	424.246.137	
Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga					1	121.809.914	1	130.336.608	1	139.460.171	1	149.222.382	1	159.667.949	
Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen					1	215.085.493	1	214.000.000	1	228.980.000	1	212.800.311	1	240.485.393	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Poin	639,91	246.925.959													
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%			58,35	182.230.634	59,15	1.152.195.829	59,85	1.187.951.160	60,45	1.311.061.095	60,95	1.449.348.517	61,35	1.635.480.158	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha di Kabupaten Bogor	%	100,00	145.381.969													
	Persentase kegiatan pelembagaan Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	%			100,00	89.077.084	100,00	980.442.443	100,00	1.027.967.353	100,00	1.135.078.907	100,00	1.255.768.110	100,00	1.422.541.710	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	40	68.501.790	10	7.854.150											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	76.880.179	1	81.222.934											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					3	100.462.075	5	110.508.283	5	121.559.111	5	133.715.022	7	149.760.825	
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					72	369.983.125	72	356.462.103	75	396.423.132	75	430.904.824	80	498.694.830	
Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga					1	509.997.243	1	560.996.967	1	617.096.664	1	691.148.264	1	774.086.055	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100	101.543.990													
	Persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%			100,00	93.153.550	100,00	171.753.386	100,00	159.983.807	100,00	175.982.188	100,00	193.580.407	100,00	212.938.448	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	78.159.895	2	85.153.150											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	25	23.384.095	2	8.000.400											
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang					50	171.753.386	65	159.983.807	80	175.982.188	95	193.580.407	100	212.938.448	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	1.296.812.825													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	953.370.964	100,00	1.856.648.743	100,00	1.705.306.760	100,00	1.886.971.238	100,00	2.057.492.303	100,00	2.311.020.108	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100,00	139.018.749	13,95	62.933.014	19,38	956.648.743	29,07	1.052.313.617	38,76	1.157.544.980	48,45	1.264.138.446	58,14	1.380.749.988	
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah Kegiatan Pencegahan KtA Terpadu	Kegiatan	3	46.566.939	2	62.933.014											
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	60	92.451.810													
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen					1	252.369.993	1	277.606.992	1	305.367.692	1	326.743.430	1	349.615.470	
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan					1	344.278.800	1	378.706.680	1	416.577.348	1	458.235.083	1	504.058.591	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang					100	359.999.950	105	395.999.945	110	435.599.940	116	479.159.933	121	527.075.927	
Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	254.388.281													
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	1697	254.388.281													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berpartisipasi dalam Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	100,00	903.405.795	100,00	890.437.950	25,00	900.000.000	50,00	652.993.143	50,00	729.426.258	50,00	793.353.857	50,00	930.270.120	
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan AMPK	Kegiatan	1	800.000.000	1	852.631.475											
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang Terlatih dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	42	30.472.970	100	37.806.475											
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	1	72.932.825													
Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga					1	900.000.000	2	652.993.143	2	729.426.258	2	793.353.857	2	930.270.120	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	37.887.939.922	BB	15.573.509.543	BB	19.934.933.422	BB	21.359.236.101	BB	22.521.054.784	BB	23.592.445.504	BB	25.186.677.786	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	71,25	405.299.968	100,00	262.036.968	100,00	503.597.268	100,00	528.777.131	100,00	555.215.987	100,00	582.976.786	100,00	612.125.626	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	199.768.964	3	112.700.909	3	178.253.643	3	187.166.325	3	196.524.641	3	206.350.873	3	216.668.417	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	46.026.230	1	21.637.500	1	23.450.525	1	24.623.051	1	25.854.204	1	27.146.914	1	28.504.260	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	12.641.440	1	11.854.250	1	16.427.825	1	17.249.216	1	18.111.677	1	19.017.261	1	19.968.124	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	38.700.200	2	12.694.850	2	76.569.575	2	80.398.054	2	84.417.956	2	88.638.854	2	93.070.797	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	9.534.050	3	11.826.700	2	14.434.325	2	15.156.041	2	15.913.843	2	16.709.535	2	17.545.012	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	10.444.260	1	10.969.525	1	16.917.700	1	17.763.585	1	18.651.764	1	19.584.352	1	20.563.570	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	88.184.824	19	80.353.234	19	132.888.175	19	139.532.584	19	146.509.213	19	153.834.674	19	161.526.407	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen					1	44.655.500	1	46.888.275	1	49.232.689	1	51.694.323	1	54.279.039	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	100,00	11.002.794.388	98,00	11.889.909.636	98,00	12.007.228.769	98,00	14.421.511.007	98,00	15.163.164.027	98,00	15.943.957.437	98,00	16.766.053.985	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	159	10.815.461.560	47	11.677.541.693	53	11.677.520.783	64	14.009.961.607	64	14.710.459.687	64	15.445.982.672	64	16.218.281.805	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	136.296.608	1	112.961.368	2	225.583.536	2	268.142.000	2	294.956.200	2	324.451.820	2	356.897.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	9.117.180	2	8.135.925	1	19.986.750	1	23.985.500	1	26.384.050	1	29.022.455	1	31.924.700	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	10.180.100	1	8.125.075	1	22.707.025	1	29.977.900	1	32.975.690	1	36.273.250	1	39.900.585	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen							1	11.870.000	1	13.057.000	1	14.362.700	1	15.798.970	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Sem esteran SKPD	Laporan	9	26.556.110	12	77.880.025	3	47.250.050	3	57.975.000	3	63.772.500	3	70.149.750	3	77.164.725	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6	5.182.830	1	5.265.550	2	14.180.625	2	19.599.000	2	21.558.900	2	23.714.790	2	26.086.200	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100,00	50.577.784	90,00	26.820.310	90,00	241.261.620	90,00	253.324.701	90,00	265.990.936	90,00	279.290.483	90,00	293.255.007	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	27	50.577.784	9	26.820.310	9	241.261.620	9	253.324.701	10	265.990.936	10	279.290.483	11	293.255.007	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	90,00	753.454.731	80,00	404.426.934	80,00	875.778.043	80,00	1.119.566.946	80,00	1.365.545.293	80,00	1.401.036.764	80,00	1.860.799.932	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18	140.828.600	6	121.201.925	21	338.894.750	22	355.839.488	23	373.631.462	24	392.313.035	26	411.928.687	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16.734.000	1	61.390.925	4	21.932.575	4	23.029.204	4	24.180.664	5	25.389.697	5	170.945.429	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	117.115.397	2	77.393.150	8	124.130.500	8	130.337.025	9	136.853.876	9	143.696.570	10	150.881.399	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	25.785.250	8	37.185.500	36	49.905.800	38	52.401.090	40	55.021.145	42	57.772.202	44	110.660.812	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	30	2.666.500	10	2.757.650	10	4.044.250	11	4.246.463	11	4.458.786	12	4.681.725	12	6.915.811	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	10.971.200	12	3.366.000	48	34.435.500	48	36.157.275	48	37.965.139	48	39.863.396	48	141.856.565	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	439.353.784	12	101.131.784	48	302.434.668	48	517.556.401	48	733.434.221	48	737.320.139	48	867.611.229	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100,00	24.671.462.166	80,00	905.995.515	80,00	2.784.113.250	80,00	1.394.986.627	80,00	1.348.015.367	80,00	1.370.904.701	80,00	1.439.449.936	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	24	583.440.000			3	999.874.225									
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit			4	717.436.675	3	153.909.725	3	161.605.211	3	169.685.472	3	178.169.745	4	187.078.233	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	22.386.537.166			2	200.000.000	1	351.535.651							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	24	70.675.000	30	188.558.840	9	1.430.329.300	9	881.845.765	10	935.938.053	10	1.192.734.956	11	1.252.371.703	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	1.630.810.000							3	242.391.842					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	590.823.101	90,00	874.166.396	90,00	1.558.340.954	90,00	1.578.225.495	90,00	1.657.136.770	90,00	1.739.993.608	90,00	1.826.993.289	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	197.178.703	12	337.338.500	48	895.774.254	48	882.530.460	48	926.656.983	48	972.989.832	48	1.021.639.324	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	393.644.398	12	536.827.896	48	662.566.700	48	695.695.035	48	730.479.787	48	767.003.776	48	805.353.965	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100	413.527.784	70,00	1.210.153.784	70,00	1.964.613.518	70,00	2.062.844.194	70,00	2.165.986.404	70,00	2.274.285.725	70,00	2.388.000.011	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	624	292.950.000	208	277.000.000	218	857.100.000	229	899.955.000	240	944.952.750	252	992.200.388	265	1.041.810.407	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit			5	780.205.100	5	925.742.850	5	972.029.993	6	1.020.631.492	6	1.071.663.067	6	1.125.246.220	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	306	120.577.784	102	152.948.684	105	181.770.668	108	190.859.201	110	200.402.162	113	210.422.270	116	220.943.384	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan yang Disinergikan	%	33,33	941.918.117													
	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	17,10		16,70	992.034.178	16,30	1.648.945.198	15,90	481.086.693	15,50	679.183.839	15,10	591.250.409	14,70	812.926.966	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100,00	41.500.969	100,00	17.223.000	100,00	389.871.950	100,00	76.545.598	100,00	138.236.799	100,00	102.106.280	100,00	158.624.159	
Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					1	255.000.750									
Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	3	8.411.195													
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan			1	17.223.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan JenjangSD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Midan, SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan							1	26.910.937	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	
Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kabupaten /Kota							1	25.326.200	1	54.598.127	1	30.057.940	1	66.063.734	
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laporan							1	24.308.461	1	53.638.672	1	42.048.340	1	52.560.425	
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	3	33.089.774													
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen					1	134.871.200									
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,0	900.417.148	100,00	974.811.178	100,00	1.259.073.248	100,00	404.541.095	100,00	540.947.040	100,00	489.144.129	100,00	654.302.807	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	45	59.098.500	1	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	72.600.000	2	75.000.000	2	80.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	3	64.723.694	1	42.367.610	2	97.278.025	2	56.541.095	2	69.900.000	2	74.144.129	2	89.302.807	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	480.600.000	1	486.600.000	1	556.522.425	1	98.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	140.000.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	3	247.705.029	2	324.740.784	13	386.710.143	13	120.000.000	13	125.000.000	13	125.000.000	13	135.000.000	
Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan									1	30.000.000			1	40.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Laporan	72	24.321.000	1	8.292.500	1	23.584.550	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	15	23.968.925	5	52.810.284	5	134.978.105	5	25.000.000	10	63.447.040	6	30.000.000	15	80.000.000	
Penyusunan Profil program pembangunan keluarga kependudukan dna KB (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Profil program pembangunan keluarga kependudukan dna KB (Bangga Kencana)	Laporan							1	20.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	13.432.141.097													
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	8,38		14,80	9.612.330.868	14,20	9.144.546.365	13,70	11.864.466.471	13,20	10.141.513.541	12,80	11.131.625.261	12,30	12.435.300.704	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	1.321.008.365	100,00	1.198.373.600	100,00	1.369.020.000	100,00	1.484.020.000	100,00	1.250.000.000	100,00	1.325.000.000	100,00	1.400.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	278.600.000	1	321.300.000	1	321.300.000	1	340.300.000	1	150000000	1	150.000.000	1	150.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2	582.400.000	1	399.000.000	1	399.000.000	1	410.000.000	1	300000000	1	300.000.000	1	300.000.000	
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	98.820.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	3	88.670.365	1	129.353.600	1	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	500.000.000	
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	72	272.518.000	80	248.720.000	80	248.720.000	80	258.720.000	80	250000000	80	250.000.000	80	250.000.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	4.617.819.146	100,00	4.669.378.960	100,00	5.757.490.562	100,00	6.415.446.471	100,00	5.290.513.541	100,00	5.783.025.261	100,00	6.554.340.704	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	301	1.305.000.000	435	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.750.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	1740	1.740.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	9	89.794.050	3	102.759.296	3	514.173.250	3	420.000.000	3	462.000.000	3	508.200.000	3	559.020.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	9	3.223.025.096	3	2.826.619.664	3	3.503.317.312	3	4.245.446.471	3	3.088.513.541	3	3.534.825.261	3	4.255.320.704	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%		5.346.755.602	29,91	3.274.532.000	30,21	1.297.921.627	30,51	805.000.000	30,82	825.000.000	31,12	900.000.000	31,42	975.000.000	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	374.190.000													
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4965	4.952.386.602	6246	3.261.032.000	1815	1.034.369.677	2000	750.000.000	2150	820.000.000	2400	895.000.000	2850	970.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	37	8.196.000													
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	132	11.983.000													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan			1	13.500.000	1	263.551.950	1	55.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100,00	2.146.557.984	100,00	470.046.308	100,00	720.114.176	100,00	3.160.000.000	100,00	2.776.000.000	100,00	3.123.600.000	100,00	3.505.960.000	
	Persentase Kampung Keluarga Berklasifikasi Mandiri	%			1,38		4,14		6,90		9,66		12,41		15,17		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	3	93.165.984													
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	10	2.053.392.000	3	470.046.308	12	720.114.176	101	3.160.000.000	103	2.776.000.000	103	3.123.600.000	113	3.505.960.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga yang ber-KB	%	84,05	27.781.275.448													
	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%			3,65	26.217.024.843	4,05	8.513.485.501	4,12	18.730.855.896	4,19	19.707.356.948	4,26	20.612.474.073	4,29	21.937.043.997	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100	1.419.670.838	65,68	2.380.828.143	66,31	2.368.026.736	67,28	2.444.013.280	68,26	2.540.254.608	73,38	2.653.280.070	75,33	2.737.608.076	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	2	9.090.000	1	9.600.000	1	9.900.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	1	10.600.000	DAK

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	183.160.360	2	1.817.364.825	2	453.236.175	2	465.000.000	2	474.400.000	2	499.400.000	2	514.400.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	49	331.842.100	15	204.715.100	23	107.661.425	15	118.413.280	15	130.254.608	15	143.280.070	15	157.608.076	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang	2019	663.739.200	750	171.375.000	738	790.500.525	750	800.000.000	750	825.000.000	750	850.000.000	750	875.000.000	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA))	Laporan	3	97.689.000	1	79.803.350	1	458.142.500	3	475.000.000	3	500.000.000	3	525.000.000	3	550.000.000	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	67	134.150.178	7	97.969.868	23	548.586.111	23	575.000.000	23	600.000.000	23	625.000.000	23	630.000.000	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	26.361.604.610	33,33	23.836.196.700	33,33	6.145.458.765	66,67	16.286.842.616	100,00	17.167.102.340	100,00	17.959.194.003	100,00	19.199.435.921	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	6	33.904.610	1	15.896.700											
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	12.537.000.000	1	8.775.900.000	1	3.194.616.700	1	8.856.933.370	1	9.365.697.632	1	9.767.719.060	1	10.598.387.230	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	13.790.700.000	1	15.044.400.000	1	2.716.607.100	1	7.388.267.973	1	7.757.681.372	1	8.145.565.440	1	8.552.843.712	
Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan					2	234.234.965	2	41.641.273	2	43.723.336	2	45.909.503	2	48.204.979	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH TENGAH (UPT PPA WILAYAH I CIAWI)				237.810.450		338.321.668		1.256.093.908		383.371.570		421.708.727		463.879.599		510.267.559	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	95.598.500													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	114.936.000	100,00	521.664.325	100,00	180.343.789	100,00	198.378.167	100,00	218.215.983	100,00	240.037.581	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	95.598.500	100,00	114.936.000	100,00	521.664.325	100,00	180.343.789	100,00	198.378.167	100,00	218.215.983	100,00	240.037.581	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	25	74.598.500	73	113.055.000											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	8	21.000.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	159.656.375	100	84.543.789	100	92.998.167	100	102.297.983	100	112.527.781	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	362.007.950	100	95.800.000	100	105.380.000	100	115.918.000	100	127.509.800	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	18.987.400													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	18.987.400													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18.987.400													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	100.615.000													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	114.936.000	100,00	734.429.583	100,00	203.027.781	100,00	223.330.560	100,00	245.663.616	100,00	270.229.978	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	100.615.000													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	114.936.000	100,00	734.429.583	100,00	203.027.781	100,00	223.330.560	100,00	245.663.616	100,00	270.229.978	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	150	73.520.000	60	113.055.000											
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Tengah (UPT PPA Wilayah I Ciawi)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.095.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	159.475.275	100	112.527.781	100	123.780.560	100	136.158.616	100	149.774.478	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	574.954.308	100	90.500.000	100	99.550.000	100	109.505.000	100	120.455.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	108.449.668											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%			80,00	46.135.100											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	10.748.100											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	31.942.700											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	3.444.300											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%			90,00	62.314.568											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	13.259.000											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	22.609.550													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	22.609.550													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPT PPA Wilayah I)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	295	22.609.550													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH TIMUR (UPT PPA WILAYAH II JONGGOL)				263.801.500		261.712.368		758.353.300		366.689.169		403.358.085		443.693.892		488.063.281	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	4,37	98.489.000													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	86.801.000	100,00	317.997.725	100,00	129.797.789	100,00	142.777.567	100,00	157.055.323	100,00	172.760.855	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	98.489.000	100,00	86.801.000	100,00	317.997.725	100,00	129.797.789	100,00	142.777.567	100,00	157.055.323	100,00	172.760.855	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	79.489.000	30	84.920.000											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.000.000	8	1.881.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	46.858.125	100	84.543.789	100	92.998.167	100	102.297.983	100	112.527.781	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	271.139.600	100	45.254.000	100	49.779.400	100	54.757.340	100	60.233.074	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	29.243.500													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	29.243.500													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PendampinganPeningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29.243.500													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	106.569.000													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	86.801.000	100,00	440.355.575	100,00	236.891.380	100,00	260.580.518	100,00	286.638.569	100,00	315.302.426	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	106.569.000													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	86.801.000	100,00	440.355.575	100,00	236.891.380	100,00	260.580.518	100,00	286.638.569	100,00	315.302.426	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	30	79.489.000	60	84.920.000											
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Timur (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.080.000	8	1.881.000											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	43.641.725	100	162.488.480	100	178.737.328	100	196.611.060	100	216.272.166	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	396.713.850	100	74.402.900	100	81.843.190	160	90.027.509	165	99.030.260	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	88.110.368											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%			80,00	5.054.800											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	3.172.750											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	1.882.050											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%			80,00	25.000.000											
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			1	25.000.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%			90,00	58.055.568											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	9.000.000											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	29.500.000													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	29.500.000													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (UPT PPA Wilayah II Jonggol)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	271	29.500.000													
UPT PPA WILAYAH III CISEENG				175.553.200													
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	68.451.200													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%															
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	68.451.200													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	49.451.200													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.000.000													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	20.770.100													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	20.770.100													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	20.770.100													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100	66.271.800													
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	66.271.800													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	150	39.181.800													
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.090.000													
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	20.060.100													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	20.060.100													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA Wilayah III Ciseeng	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	331	20.060.100													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH IV TAMANSARI				254.255.750													
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	95.096.965													
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	95.096.965													
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	75.111.965													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	19.985.000													
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	34.307.690													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	34.307.690													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampinga Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	34.307.690													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	98.545.395													
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	98.545.395													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%															
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	100	71.450.395													
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.095.000													
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	26.305.700													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	26.305.700													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA Wilayah IV Tamansari	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1143	26.305.700													

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
UPT PPA WILAYAH BARAT (UPT PPA WILAYAH V LEUWISADENG)				238.935.293		380.202.917		907.480.775		926.604.814		972.935.054		1.021.581.807		1.072.660.897	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Rasio	2,08	56.461.735													
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	81.305.000	100,00	305.180.925	100,00	320.439.971	100,00	336.461.970	100,00	353.285.068	100,00	370.949.321	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	56.461.735	100,00	81.305.000	100,00	305.180.925	100,00	320.439.971	100,00	336.461.970	100,00	353.285.068	100,00	370.949.321	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	50	36.161.735	30	71.395.000											
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	7	20.300.000	1	9.910.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	86.681.225	100	91.015.286	100	95.566.051	105	100.344.353	110	105.361.570	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	218.499.700	100	229.424.685	100	240.895.919	105	252.940.715	110	265.587.751	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	19.926.808													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan di Kabupaten Bogor	%	100,00	19.926.808													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah V (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	19.926.808													
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kekerasan terhadap anak yang ditangani	%	100,00	76.235.700													
	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%			100,00	148.457.050	100,00	602.299.850	100,00	606.164.843	100,00	636.473.084	100,00	668.296.739	100,00	701.711.576	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	76.235.700													
	Persentase Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani	%			100,00	148.457.050	100,00	602.299.850	100,00	606.164.843	100,00	636.473.084	100,00	668.296.739	100,00	701.711.576	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	330	49.155.700	130	137.439.050											
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK UPT PPA Wilayah Barat (UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng)	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	10	27.080.000	30	11.018.000											
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	187.069.850	100	196.423.343	100	206.244.509	105	216.556.735	110	227.384.572	

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang					100	415.230.000	100	409.741.500	100	430.228.575	105	451.740.004	110	474.327.004	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat			BB	150.440.867											
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%			80,00	29.189.899											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			6	3.792.707											
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			1	1.575.349											
Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			2	892.233											
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket			1	2.217.610											
Fasilitasi Kunjungan Tamu UPT PPA Wilayah Barat	Jumla Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan			12	1.452.000											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			12	19.260.000											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%			80,00	50.000.000											
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1	50.000.000											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%			90,00	60.580.968											
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	11.525.400											
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan			12	49.055.568											

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN....														KET
			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			REALISASI	REALISASI PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%			70,00	10.670.000											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	8.640.000											
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPA Wilayah Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			1	2.030.000											
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	9,79	86.311.050													
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	86.311.050													
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) UPT PPA V Wilayah Leuwisadeng	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	345	86.311.050													
TOTAL ANGGARAN				83.705.682.546		55.555.873.609		55.038.548.208		65.944.209.403		65.767.467.511		69.372.825.189		74.850.250.488	

B. RKPD Tahun 2026

Rencana Kerja Tahun 2026 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk (DP3AP2KB) berdasarkan Renstra 2025-2029 dan RKPD tahun 2026 terdiri dari 10 program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender, dengan anggaran Rp. 3.966.651.993,-
Terdiri dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan
2. Program Perlindungan Perempuan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.934.096.575,-
Terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp. 4.213.034.500,-
Terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 645.465.261,-
Terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.882.268,-
Terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan
6. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan anggaran sebesar Rp. 3.550.747.443,-
Terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan
7. Program Pengendalian Penduduk, dengan anggaran sebesar Rp. 1.611.286.998,-
Terdiri dari 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan anggaran sebesar Rp. 8.935.705.489,-
Terdiri dari 4 kegiatan dan 11 sub kegiatan
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, dengan anggaran sebesar Rp. 8.319.056.636,-
Terdiri dari 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 19.479.664.368,-
Terdiri dari 7 kegiatan dan 30 sub kegiatan

Total Jumlah anggaran Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) sebesar Rp. 53.781.591.531,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pendanaannya berdasarkan Renstra Perangkat daerah untuk Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026, disajikan pada tabel 4.1

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2024

URUSAN/USUR
BIDANG URUSAN
PERANGKAT DAERAH

: NON URUSAN PELAYANAN DASAR
: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	33,14	3.966.651.993				4.122.847.427
1.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memahami tentang Pelebagaan PUG	%	100,00	1.533.899.818				1.364.940.646
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	149.999.875	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		152.500.000
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1	233.900.318	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		240.595.646,00
1.1.3	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG ditingkat kab/kota	Kebijakan	1	500.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		205.250.000
1.1.4	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	499.999.625	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		510.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga	2	150.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		256.595.000
1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100,00	599.350.125				615.834.168
1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang		129.675.100	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		136.158.964
1.2.2	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	60	469.675.025	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		479.675.204

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	%	100,00	1.833.402.050				2.142.072.613
1.3.1	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	4	600.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		882.000.000
1.3.2	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	120	399.999.900	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		410.000.000
1.3.3	Mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	1	833.402.150	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		850.072.613

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	789.253.600				615.096.187
2.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	%	100,00	250.126.625				163.662.738
2.1.1	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	1	250.126.625	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		163.662.738
2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	337.326.375				320.183.449
2.2.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang	10	337.326.375	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320.183.449
2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Relawan PPA (Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan) yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	%	100,00	201.800.600				131.250.000
2.2.3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang	100	201.800.600	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		131.250.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	33,56	4.213.034.500				3.762.874.659
3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang dapat Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	%	0,0020	3.363.040.650				3.363.040.794
3.1.1	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1500	3.363.040.650	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.363.040.794
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang berkerjasama pada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang terbina	%	0,0026	717.993.850				261.233.865
3.2.1	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	2	131.999.900	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		138.600.000
3.2.2	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga	2	585.993.950	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		122.633.865

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ada di Wilayah Kerja	%	100,00	132.000.000				138.600.000
3.3.1	Layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	144	132.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		138.600.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	13,47	645.465.261				677.738.524
4.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kuantitas Data Gender dan Anak yang ada Dalam Kelembagaan Data	%	100,00	645.465.261				677.738.524
4.1.1	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	323.655.347	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SKPD Terkait, UPT PPPA, instansi terkait		339.838.114
4.1.2	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga	1	121.809.914	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SKPD Terkait, UPT PPPA, instansi terkait		127.900.410
4.1.3	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen	1	200.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SKPD Terkait, UPT PPPA, instansi terkait		210.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,15	1.125.882.268				1.148.373.846
5.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	%	100,00	980.442.443				995.497.737
5.1.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	3	100.462.075	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81.801.223
5.1.2	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	369.983.125	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH		388.500.000
5.1.3	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	509.997.243	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525.196.514

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Diberi Penguatan	%	100,00	145.439.825				152.876.109
5.2.1	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang	50	145.439.825	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		152.876.109
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	1.856.648.743				1.796.750.000
6.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga/SKPD yang mengikuti Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	%	100,00	956.648.743				1.061.750.000
6.1.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	252.369.993	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		278.750.000
6.1.2	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	1	344.278.800	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		405.000.000
6.1.3	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	100	359.999.950	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		378.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembang Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	%	100,00	900.000.000				735.000.000
6.2.1	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	900.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		735.000.000
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	19.479.664.368				18.000.415.987
7.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja PD yang berkualitas	%	100,00	503.597.268				645.662.320
7.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	178.253.643	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		277.630.608
7.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	23.450.525	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.965.114
7.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	16.427.825	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.249.674
7.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	76.569.575	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		67.662.129

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	14.434.325	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.156.112
7.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	16.917.700	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.766.354
7.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	132.888.175	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148.482.329
7.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	44.655.500	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78.750.000
7.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	%	98,00	12.007.228.769				12.023.715.096
7.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	53	11.677.520.783	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.677.520.783
7.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	225.583.536	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		236.862.972
7.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	19.986.750	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.986.221
7.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	22.707.025	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23.842.562

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	47.250.050	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49.612.574
7.2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	14.180.625	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.889.984
7.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	90,00	241.261.620				257.001.110
7.3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	9	241.261.620	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		257.001.110,00
7.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	80,00	875.778.043				933.100.775
7.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	338.894.750	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		437.448.414
7.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	21.932.575	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23.040.969
7.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	124.130.500	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		113.663.603
7.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	49.905.800	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.716.189

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	4.044.250	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.246.735
7.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48	34.435.500	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.165.255
7.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	302.434.668	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		272.819.610
7.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	80,00	2.384.113.250				1.022.177.929
7.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.199.874.225	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-
7.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	153.909.725	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		161.700.000
7.5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	9	1.030.329.300	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		860.477.929

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	90,00	1.503.071.900				1.509.651.450
7.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	840.505.200	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		882.534.555
7.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	662.566.700	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		627.116.895
7.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	70,00	1.964.613.518				1.609.107.307
7.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	218	857.100.000	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.058.777.527
7.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	925.742.850	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		359.021.250
7.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	105	181.770.668	Kab. Bogor, Cibinong, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		191.308.530

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran dari Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	16,30	1.611.286.998				1.247.720.977
8.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengendalian Kuantitas Penduduk	%	100,00	389.871.950				304.364.753
8.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	255.000.750	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		162.750.000
8.1.2	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	134.871.200	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		141.614.753
8.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Program Bangga Kencana yang Tersedia	%	100,00	1.221.415.048				943.356.224
8.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	2	60.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.2.2	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	2	59.619.825	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		96.534.887
8.2.3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1	556.522.425	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		496.600.000
8.2.4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	14	386.710.143	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		151.206.344
8.2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	1	23.584.550	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		92.287.983
8.2.6	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	5	134.978.105	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.727.010

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	14,20	8.935.705.489				9.283.214.998
9.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	%	100,00	1.369.020.000				1.434.020.000
9.1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	321.300.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340.300.000
9.1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	399.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		410.000.000
9.1.3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	100.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.1.4	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	300.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		315.000.000
9.1.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	72	248.720.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		258.720.000
9.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang diberdayakan dalam Program KKBPK	%	100,00	5.757.490.562				6.600.269.787
9.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1740	1.740.000.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.750.000.000
9.2.2	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	3	514.173.250	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		339.513.892

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.2.3	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3	3.503.317.312	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4.510.755.895
9.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB	%	100,00	1.089.080.751				763.649.185
9.3.1	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1815	825.528.801	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		708.649.185
9.3.2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	263.551.950	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%	100,00	720.114.176				485.276.026
9.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	12	720.114.176	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		485.276.026
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	4,70	8.319.056.636				19.570.141.956
10.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	2.368.026.736				2.486.742.710
10.1.1	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	9.900.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.600.000
10.1.2	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2	453.236.175	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		476.030.813

NO	PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1.3	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	23	107.661.425	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		113.030.859
10.1.4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang	738	790.500.525	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		830.015.744
10.1.5	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	1	458.142.500	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		481.049.859
10.1.6	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok	23	548.586.111	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		576.015.435

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembinaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina	%	100,00	5.951.029.900				17.083.399.246
10.2.1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	3.194.616.700	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.653.490.000
10.2.2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	2.716.607.100	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.388.267.973
10.2.3	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan	2	39.806.100	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.641.273

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT PPA WILAYAH TENGAH				1.223.107.600				1.279.263.085
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	521.664.325				376.701.040
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	521.664.325				376.701.040
1.2.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	159.656.375	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		201.626.040
1.2.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	76	362.007.950	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		175.075.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	701.443.275				902.562.045
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	701.443.275				902.562.045
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	159.475.275	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		777.822.045

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	202	541.968.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		124.740.000
	UPT PPA II WILAYAH TIMUR				733.353.300				750.021.480
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	317.997.725				323.897.890
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	317.997.725				323.897.890
1.2.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	187	46.858.125	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180.700.890
1.2.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	126	271.139.600	Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		143.197.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	415.355.575				426.123.590
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,000	415.355.575				426.123.590
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	43.641.725	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		255.102.640
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	126	371.713.850	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		171.020.950
	UPT PPA WILAYAH BARAT				882.480.775				706.604.630
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	305.180.925				210.439.630
1.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	%	100,00	305.180.925				210.439.630
1.2.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	36	86.681.225	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		170.014.630

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2026				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
				VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	5	218.499.700	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.425.000
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	577.299.850				496.165.000
2.1	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Anak yang terlayani	%	100,00	577.299.850				496.165.000
2.1.1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	920	187.069.850	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		418.780.000
2.1.2	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	10	390.230.000	Kab. Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77.385.000
	TOTAL				53.781.591.531				62.961.063.756

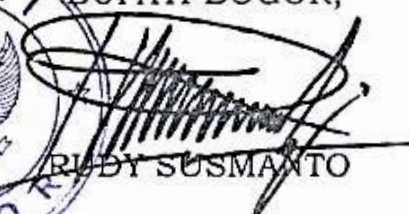
BAB V

PENUTUP

Demikian Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 telah disusun dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahapan penganggaran, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2026 hingga ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian substansi dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan mendahului penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, maka Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan disesuaikan dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 di tahun berjalan.

Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar dapat diketahui pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta menjadi bahan rekomendasi terhadap perencanaan tahun berikutnya.

 **BUPATI BOGOR,**

RUDY SUSMANTO